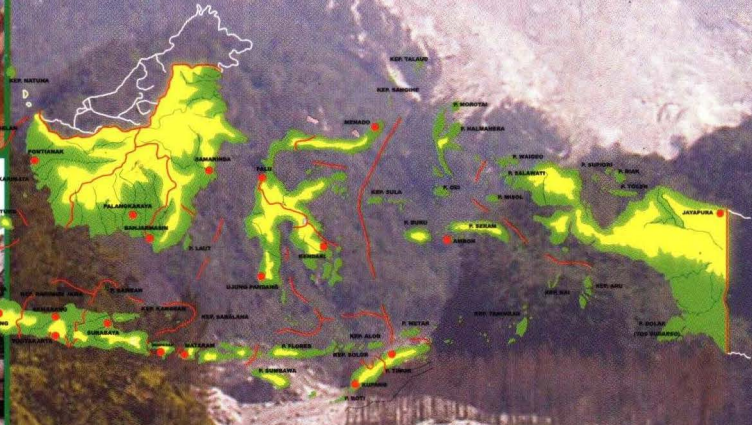
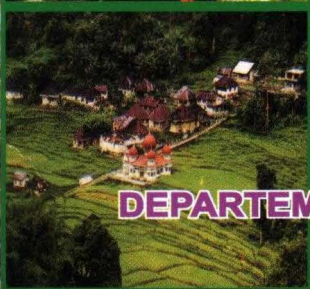
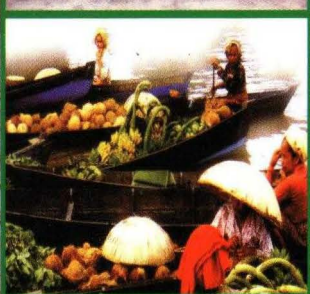
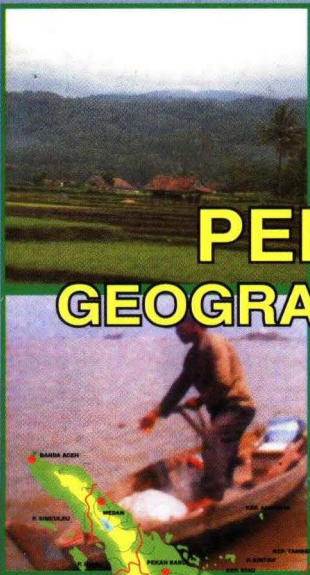




# PEDOMAN KAJIAN GEOGRAFI SEJARAH INDONESIA



**DISUSUN :**  
Agus Aris Munandar  
Agus Mulyana  
Didik Pradjoko  
Priyadi Kardono  
Restu Gunawan  
Trini Hastuti

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
JAKARTA  
2006**

# **PEDOMAN KAJIAN GEOGRAFI SEJARAH INDONESIA**



**DISUSUN :**  
**Agus Aris Munandar**  
**Agus Mulyana**  
**Didik Pradjoko**  
**Priyadi Kardono**  
**Restu Gunawan**  
**Trini Hastuti**

**DIREKTORAT GEOGRAFI SEJARAH  
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA  
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
JAKARTA  
2006**

# **PEDOMAN KAJIAN GEOGRAFI SEJARAH INDONESIA**

**Editor :**

Kasijanto, M. Hum

Drs. Sutiman, M. Hum

*Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang  
All right reserved*

**Diterbitkan Oleh :** Departemen Kebudayaan dan Pariwisata  
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala  
Tahun 2006

**Cetakan Pertama :** November 2006

**Dicetak Oleh :** CV. Multi Prima  
Jl. Pratama No. 6A, Jagakarsa,  
Lenteng Agung, Jakarta Selatan  
Telp./Fax. : (021) 7872919

**Penanggung Jawab :**

**Ir. Jero Wacik, SE.** Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Pengarah)

**Drs. Hari Untoro Dradjat, MA.** Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala  
(Pengarah)

**Dra. Sri Rahayu Budiarti, MM.** Plt. Direktur Geografi Sejarah  
(Penanggung Jawab)

**Dra. Sri Suharni.** Kasubdit Lingkungan Sejarah  
(Koordinator Pelaksana)

## PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2006 telah menyusun buku draft **Pedoman Kajian Geografi Sejarah Indonesia**.

Kami menyusun buku dengan maksud agar dapat digunakan sebagai acuan atau bahan rujukan untuk penulisan mengenai Kajian Geografi Sejarah Indonesia bagi para peneliti sejarah atau peminat sejarah.

Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada nara sumber, tim penulis yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan buku ini. Namun demikian mengingat Geografi Sejarah adalah suatu wilayah kajian sejarah yang relatif baru, maka untuk penyempurnaan pedoman ini agar lebih operasional, kami mengharap adanya saran dan kritik yang konstruktif. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, November 2006  
PLT. Direktur Geografi Sejarah



Dra. Sri Rahayu Budiarti, MM  
NIP. 720000093

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>BAB 1 Pendahuluan</b> .....	1
1.1 Tujuan dan Sasaran .....	1
1.2 Batasan dan Konsep Geografi Sejarah .....	1
1.3 Tema Kajian Geografi Sejarah .....	2
1.4 Aspek Ruang dan Waktu .....	3
1.5 Sumber Sejarah .....	4
1.5.1 Sifat Sumber Sejarah .....	4
1.5.2 Bentuk Sumber Sejarah .....	4
1.6 Metode Penelitian .....	5
1.7 Petunjuk Penggunaan .....	9
<b>BAB 2 Lingkungan Sejarah</b> .....	10
2.1 Pengantar .....	10
2.2 Kajian Lingkungan Fisik .....	10
a. Perubahan Bentuk Lahan .....	11
b. Perubahan Iklim .....	12
c. Bencana Alam .....	13
d. Perubahan Permukiman .....	13

2.3	Kajian Lingkungan Sosial Budaya .....	14
a.	Sistem Mata Pencarian Daerah Pedalaman dan Pesisir .....	16
b.	Pelayaran dan Perdagangan .....	17
c.	Sistem Kepercayaan .....	18
d.	Sistem Politik .....	19
e.	Pola Konsumsi .....	20
<b>BAB 3</b>	<b>Peradaban Sejarah .....</b>	<b>21</b>
3.1	Pengantar .....	21
3.2	Masyarakat Pemburu dan Peramu .....	24
3.3	Masyarakat Peladang dan Peternak .....	26
3.4	Kajian Masyarakat Maritim.....	29
3.5	Kajian Masyarakat Petani-Sawah .....	32
3.6	Kajian Masyarakat Perkotaan.....	35
3.7.	Penutup .....	38
<b>BAB 4</b>	<b>Kajian Dinamika Penataan Wilayah .....</b>	<b>39</b>
4.1	Pengantar .....	39
4.2	Kajian tentang Dinamika Penataan Wilayah .....	40
4.3	Berbagai Argumen Pemekaran Wilayah .....	42
a.	Data Artefaktual dan Monumen .....	43
b.	Sumber Tertulis .....	43
c.	Sumber Lisan .....	44
d.	Bahasa .....	44
e.	Kekayaan Sumber Daya Alam .....	44
4.4	Pemekaran Wilayah Lepas Pantai dan Kepulauan .....	47

4.5	Berbagai Argumen Penggabungan Wilayah .....	50
4.6	Tahapan Kajian Dinamika Penataan Wilayah .....	52
4.7	Kajian Wilayah Perbatasan .....	54
<b>BAB 5</b>	<b>Pemetaan Geografi Sejarah .....</b>	<b>57</b>
5.1	Pengertian dan Batasan.....	57
5.1.1	Pengertian Peta .....	57
	a. Peta Dasar Rupabumi/Peta Topografi .....	58
	b. Peta Tematik .....	58
5.1.2	Karakteristik Peta .....	58
5.2	Pembuatan Peta Kerja.....	65
5.3	Peta Tematik Geografi Sejarah.....	68
5.4	Pembuatan Simbol Peta Tematik Geografi Sejarah .....	69
5.5	Pemetaan Lingkungan Sejarah .....	70
5.5.1	Lingkungan Fisik .....	70
	a. Peta Perubahan Iklim .....	70
	b. Bencana Alam .....	72
	c. Perubahan Permukiman .....	73
5.5.2	Lingkungan Sosial Budaya.....	75
	a. Sistem Mata Pencaharian Daerah Pedalaman dan Pesisir .....	75
	b. Pelayaran dan Perdagangan .....	76
5.6	Pemetaan Peradaban Sejarah.....	78
	5.6.1 Masyarakat Pemburu dan Peramu .....	78
	5.6.2 Masyarakat Maritim .....	79
5.7	Pemetaan Dinamika Penataan Wilayah .....	80
5.8	Pembuatan Sketsa Geografi Sejarah.....	84

5.9	Kelengkapan dan Finishing Peta Geografi Sejarah.....	85
5.10	Desain Tata Letak (Layout) Peta Sejarah .....	87
<b>BAB 6</b>	<b>Historiografi Geografi Sejarah .....</b>	<b>88</b>
6.1	Kerangka Umum Penulisan.....	88
6.1.1	Bagian Pendahuluan .....	88
6.1.2	Bagian Isi .....	89
6.1.3	Bagian Akhir .....	89
6.2	Bentuk Penulisan.....	89
6.2.1	Ragam Penulisan .....	90
6.2.2	Sifat Penulisan .....	90
6.3	Model Penulisan.....	91
6.4	Gaya Penulisan.....	92
6.5	Visualisasi Peta.....	94
6.6.	Lain-lain .....	94
6.6.1	Catatan Kaki .....	94
6.6.2	Catatan Belakang .....	95
6.6.3	Kutipan .....	95
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>97</b>



# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran buku ini adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai pedoman bagi para peneliti sejarah dan peminat sejarah dalam melakukan penelitian di bidang geografi sejarah.
- b. Sebagai pedoman kerja di lingkungan Direktorat Geografi Sejarah, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Arkeologi dan Pemerintah Daerah.
- c. Sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan mendokumentasikan sumber-sumber penulisan geografi sejarah bagi peminat sejarah.

### 1.2 Batasan dan Konsep Geografi Sejarah

Sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dinamika masyarakat pada masa lalu dengan menggunakan sumber tertulis dan sumber lisan.

Geografi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dan permukaan bumi (pegunungan, hutan, savana, sungai, danau, laut, iklim, flora, fauna, padang pasir, dan gejala alam lainnya).

Geografi sejarah adalah bagian dari ilmu sejarah yang menekankan perhatian pada aspek-aspek geografi, yang meliputi aspek alami (sungai, laut, gunung, iklim, danau, dan lain-lain) dan aspek buatan manusia (sawah, kanal, jalan, permukiman, perkebunan, bangunan, dan lain-lain), yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dan permukaan bumi.

### **1.3 Tema Kajian Geografi Sejarah**

Kajian geografi sejarah meliputi tema-tema sebagai berikut.

- 1) Hubungan timbal balik antara manusia dan alam (tanah, air, iklim) dalam perspektif sejarah.
  - a. Perubahan iklim yang diakibatkan oleh manusia dan menimbulkan dampak terhadap manusia (contoh: pemanasan global, perubahan musim, dan hujan asam).
  - b. Perubahan permukaan tanah (contoh: longsor, penurunan muka tanah, pengendapan, erosi, akresi, abrasi, dan tsunami).
  - c. Perubahan permukaan air (contoh: banjir, pasang surut, waduk, serta pendangkalan sungai dan danau).
- 2) Hubungan timbal balik antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya.
  - a. Lingkungan fisik (contoh: perubahan fungsi lahan, dan tutupan lahan).
  - b. Lingkungan sosial budaya (contoh: pola permukiman, pola konsumsi, dan sistem politik).
- 3) Peradaban masyarakat berburu dan meramu, peladang, peternak, petani, nelayan, masyarakat kota.

- 4) Penataan wilayah yang meliputi pemekaran dan penggabungan wilayah.
  - a. Daerah-daerah yang dipecah dari daerah induknya (contoh: pemekaran desa).
  - b. Daerah-daerah yang digabungkan menjadi satu daerah yang lebih besar (contoh: penggabungan desa).
  - c. Daerah perbatasan (contoh: kondisi fisik geografi yang mempengaruhi batas wilayah).
- 5) Peta sejarah, yaitu peta yang dihasilkan dari proses kajian berdasarkan tema-tema lingkungan sejarah, peradaban sejarah, dan penataan sejarah.

#### **1.4 Aspek Ruang dan Waktu**

Dalam kajian geografi sejarah, penetapan aspek ruang dan waktu sangat menentukan keberhasilan sebuah penelitian yang dirancang. Dalam kajian geografi sejarah, satuan ruang dibatasi oleh alam, budaya, dan administrasi. Misalnya, batas kabupaten yang ditentukan oleh sungai, pemakaian bahasa, dan batas yang ditentukan oleh peraturan formal. Batas waktu dapat ditentukan oleh suatu peristiwa tertentu.

Dalam kajian geografi sejarah aspek ruang dibagi menjadi:

- 1) satuan ruang kultural, misalnya sebaran penggunaan bahasa, pagar keliling kota lama, bentuk-bentuk kesenian;
- 2) satuan ruang geografi, misalnya bentuk ruang yang dibatasi oleh bentuk-bentuk permukaan bumi berupa bukit, sungai, gunung, laut, dan danau;

- 3) satuan ruang administrasi (arbitrer), misalnya ruang yang dibatasi oleh peraturan administrasi pemerintahan dan garis koordinat (garis lintang dan garis bujur).

## 1.5 Sumber Sejarah

### 1.5.1 Sifat Sumber Sejarah

Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah digolongkan sebagai berikut.

- a. Sumber primer, yaitu saksi sejarah atau saksi pandangan mata. Sumber primer mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber sekunder. Sumber primer dapat berupa arsip pemerintah, koran sezaman, dan pelaku sejarah/saksi mata.
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber yang bukan saksi sejarah atau pelaku sejarah. Sumber sekunder dapat berupa buku-buku, artikel, film, novel dan lain-lain.

### 1.5.2 Bentuk Sumber Sejarah

Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dikategorikan sebagai berikut.

- a. Sumber tertulis, yaitu arsip, manuskrip (naskah tradisional), naskah *carik* (tulisan tangan), pawukon (kalender lokal), ramalan, karya sastra lokal, prasasti, surat-surat resmi ataupun pribadi, memoar, buku harian, buku tercetak, dan sebagainya.
- b. Sumber lisan, meliputi tradisi lisan dan sejarah lisan.
  - 1) Tradisi lisan adalah kesaksian lisan yang disampaikan secara verbal dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti cerita rakyat, syair, tembang, dan mantra.

- 2) Sejarah lisan merupakan informasi lisan dari informan pelaku atau saksi sejarah tentang suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu dan lokalitas tertentu.
- c. Artefak, yaitu benda-benda yang dihasilkan dan digunakan oleh pelaku sejarah pada masa lampau, seperti gerabah, dapur tradisional, keris, sabit, mandau, rencong, uang logam, arsitektur tradisional, benteng, makam, batu nisan, mesin ketik tua, menara radio, masjid, gereja, dan bekas permukiman.
- d. Sumber audio dan visual, yaitu foto, *microfisk*, *microfilm*, film, *compact disk*, *website*, dan sebagainya.

## 1.6 Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian geografi sejarah meliputi tahap-tahap sebagai berikut.

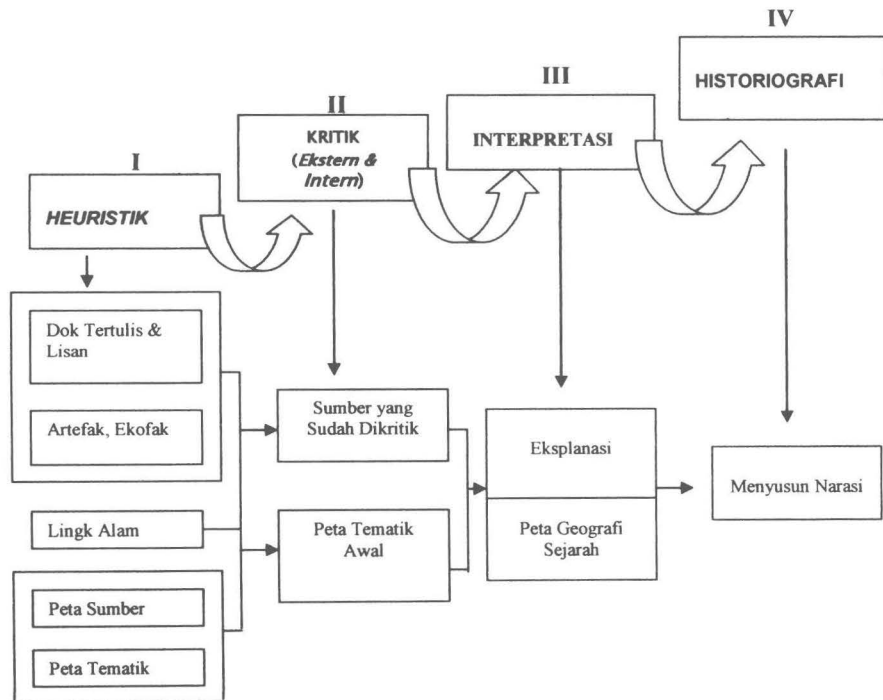
- 1) Pemilihan topik, yaitu bahasan atau pokok kajian yang akan diteliti. Topik penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain untuk keperluan ilmiah, kedekatan emosional dengan peneliti, dan kepentingan kebijakan pemerintah daerah (misalnya penentuan hari jadi). Setelah topik ditentukan, dirumuskan permasalahan penelitian, berbentuk kalimat deklaratif (pernyataan) atau kalimat tanya.
- 2) Pengumpulan sumber mencakup studi kepustakaan dan wawancara.
  - a. Studi kepustakaan merupakan pelacakan terhadap arsip-arsip dan literatur lainnya; dilakukan melalui pengecekan terhadap katalog di berbagai perpustakaan dan kantor arsip yang relevan.
  - b. Wawancara, merupakan pengumpulan data lisan dari pelaku dan saksi sejarah.

Langkah-langkah wawancara sebagai berikut.

- (1) Persiapan, kegiatan utamanya adalah:
    - menentukan informan
    - membuat pedoman wawancara
    - menyiapkan alat perekam (*tape recorder*, kaset kosong, alat tulis, dan kamera).
  - (2) Penelitian lapangan, kegiatan utamanya adalah:
    - melakukan survai awal tentang biodata informan
    - membuat janji untuk wawancara
    - memahami tipologi dan sifat informan (pendiam, banyak bicara, rendah diri, angkuh, curiga).
  - (3) Transkripsi, kegiatan utamanya adalah menyalin hasil rekaman menjadi tulisan, dalam bentuk
    - transkripsi menyeluruh, yakni mengubah seluruh hasil rekaman menjadi tulisan dan/atau
    - transkripsi terpilih, yakni mengubah bagian tertentu hasil rekaman yang dipandang penting menjadi tertulis.
- 3) Kritik sumber, yakni mengadakan verifikasi terhadap sumber yang telah dikumpulkan dengan cara melakukan kritik eksternal (otentisitas) dan kritik intern (kredibilitas).
- a. Kritik ekstern (otentisitas). verifikasi otentisitas diarahkan untuk menguji keaslian sumber, wujud fisik sumber, tipografi, contoh bahan kertas yang digunakan sesuai dengan zamannya. Untuk menentukan otentisitas diajukan pertanyaan (1) kapan sumber itu dibuat, (2) di mana sumber itu dibuat dan ditemukan (lokasi), (3) siapa

- yang membuat (kepengarangan), dan (4) dari bahan apa sumber itu dibuat (analisis), dan sebagainya.
- b. Kritik intern (kredibilitas). verifikasi kredibilitas dimaksudkan untuk menilai kesahihan informasi dalam suatu sumber sejarah menguji isi sumber (bahasa, informasi) dengan cara membandingkan dengan sumber lainnya (tertulis dan lisan). Ada empat aspek dalam menilai apakah seorang saksi memberikan informasi yang akurat, yaitu (1) kemampuan menyatakan kebenaran, (2) kemauan menyatakan kebenaran, (3) keakuratan pelaporan, dan (4) adanya dukungan secara bebas (*external corroboration*) mengenai isi laporan yang disampaikan.
- 4) Interpretasi, meliputi dua kegiatan yaitu analisis dan sintesis.
- a. Analisi, berarti menguraikan. Pada tahap ini, seorang peneliti sejarah berusaha menguraikan suatu sumber sejarah menjadi bagian-bagian yang masih ada pertautannya. Sebagai contoh, berdasarkan tradisi lisan *seumong* di daerah Siemelue, Aceh, dikatakan bahwa jika air laut secara tiba-tiba surut, segeralah mencari tempat yang lebih tinggi. Selain itu, dari naskah-naskah di daerah tersebut ditemukan istilah *ibeuna*, artinya kira-kira air bah. Dari dua sumber tersebut dapat dianalisis bahwa daerah Aceh dan sekitarnya memang pernah terjadi tsunami. Suatu tradisi lisan biasanya menunjukkan kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada masa lalu, tetapi tidak diceritakan secara tepat. Untuk itulah penulis harus mengadakan analisis.

- b. Sintesis berarti menyatukan. Dalam kegiatan ini, sejarawan berusaha menyatukan atau mengintegrasikan data yang memiliki keterkaitan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Contoh, berdasarkan data nama perkampungan di Jakarta, seperti Kampung Bandan, Manggarai, Kampung Bali, Pekojan, Kampung Makassar, Matraman, dan Kampung Ambon dapat disimpulkan bahwa Jakarta pada masa lalu merupakan daerah kota multietnis.



Bagan: Alur prosedur penelitian



## **1.7 Petunjuk Penggunaan**

Buku pedoman kajian geografi sejarah ini merupakan upaya dasar untuk melakukan kajian geografi sejarah. Tema-tema besar dalam kajian geografi sejarah yang diperhatikan dalam buku ini adalah tentang (1) lingkungan sejarah, (2) peradaban sejarah, dan (3) dinamika penataan wilayah. Setiap tema besar tersebut pada dasarnya dapat dikaji secara mandiri dan akan menghasilkan bentuk historiografi dan pemetaan tersendiri pula.

Apabila peneliti hanya berminat meneliti satu tema kajian, misalnya peradaban sejarah, ia dapat menggunakan Bab 3, kemudian melanjutkan ke tahap historiografi dan pembuatan peta tematik geografi sejarah. Apabila peneliti hanya berminat pada kajian dinamika penataan wilayah, ia dapat melihat pedoman kajian yang diuraikan dalam Bab 4, dan seterusnya.

Pedoman penyusunan peta tematik geografi sejarah diuraikan dalam Bab 5. Pada bab tersebut diuraikan pembuatan peta tematik yang sesuai dengan kebutuhan kajian didasarkan pada tiga tema besar yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab-bab dalam buku ini dapat dipelajari secara berkesinambungan karena hal itu akan dapat menambah wawasan peneliti dalam melakukan kajian geografi sejarah.

## Bab 2

# LINGKUNGAN SEJARAH

### 2.1 Pengantar

Salah satu bagian yang harus diperhatikan dalam penulisan geografi sejarah adalah lingkungan kesejarahan, yang meliputi (a) lingkungan fisik dan (b) lingkungan sosial budaya. Penelitian geografi sejarah mengkaji kedua jenis lingkungan tersebut dengan melihat hubungan timbal balik dalam konteks ruang dan waktu.

### 2.2 Kajian Lingkungan Fisik

Secara teoretis lingkungan fisik diartikan bahwa semua benda mati yang ada di sekeliling manusia adalah gejala fisik di permukaan bumi yang terdiri dari atas tanah, air, dan udara dengan segala prosesnya. Dalam pendekatan geografi sejarah, alam fisik manusia dilihat dalam dimensi perubahan waktu yang dikaitkan dengan dimensi ruang. Pendekatan keruangan dilakukan melalui prinsip persebaran, interelasi, interaksi, dan

deskripsi. Dengan pendekatan ini dapat diungkapkan berbagai hal penting tentang perubahan alam dan kebudayaan manusia. Konsep ruang yang dimaksud adalah kenampakan yang muncul secara fisik dalam geografi, yaitu tanah, air, dan udara dengan segala prosesnya. Sedangkan konsep waktu adalah temporal yang menunjukkan adanya perubahan. Dalam penulisan geografi sejarah, lingkungan fisik disajikan sebagai suatu bahasan yang senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Tema-tema penting yang dapat dikaji dalam penulisan geografi sejarah berkaitan dengan lingkungan fisik adalah sebagai berikut.

#### **a. Perubahan Bentuk Lahan**

Pendekatan ruang dan waktu dilakukan dalam melihat perubahan bentuk lahan. Perubahan bentuk lahan dilihat dari aspek waktu, selain dicari faktor penyebabnya. Secara teoretis, dalam penulisan geografi sejarah bentuk lahan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tanah yang berupa dataran dan tanah yang berupa pegunungan atau dataran tinggi. Dua kategori bentuk lahan tersebut merupakan lingkungan fisik sebagai sesuatu yang berubah. Analisis yang digunakan adalah bagaimana perubahan itu terjadi dan apa atau siapa yang menentukan perubahannya. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut terdapat dua konsep hubungan, yaitu, pertama, hubungan antarsesama gejala alam, dan kedua hubungan antarmanusia dengan alam. Kedua konsep hubungan itu berdampak pada terjadinya perubahan lingkungan fisik dalam konteks waktu.

Konsep hubungan antarsesama gejala alam menunjukkan bahwa lingkungan fisik dapat berubah disebabkan oleh alam itu sendiri atau perubahan secara alami. Konsep ini dapat digunakan untuk meneliti, misalnya, perubahan bentuk lahan di pinggir pantai. Tanah di pinggir pantai yang semula merupakan daratan berubah menjadi daerah berair yang digenangi oleh air laut, atau bibir pantai menjadi bertambah sehingga luas daratan semakin berkurang. Untuk mencari jawaban penyebab berubahnya bentuk lahan pantai tersebut dapat dikaji dari gejala alam yang terjadi secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Gejala alam tersebut berupa abrasi yang disebabkan oleh ombak laut.

Contoh tema penelitian tentang perubahan lingkungan fisik yang disebabkan oleh manusia, adalah perkembangan lingkungan fisik yang terjadi di daerah perkotaan. Penelitian diarahkan untuk mempelajari faktor perubahan fisik alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya untuk lahan persawahan, perkebunan, dan pemukiman.

### **b. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim biasanya menampakkan pola perubahan yang menetap sehingga menunjukkan suatu siklus. Iklim di Indonesia dikenal dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pola perubahan iklim ini akan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan fisik. Misalnya, musim hujan dapat menimbulkan bencana banjir. Banjir dapat mengubah lingkungan fisik, misalnya rusaknya lahan pertanian, infrastuktur sarana transportasi, dan permukiman masyarakat. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat berakibat terjadinya

kekeringan lahan pertanian. Kekeringan lahan pertanian, dapat berakibat terjadinya perubahan mata pencarian petani. Ia berganti pekerjaan menjadi kuli bangunan sehingga menimbulkan dampak yang lebih luas yakni urbanisasi musiman di kota. Berdasarkan contoh tersebut, penelitian dapat dilakukan untuk mempelajari hubungan antara perubahan iklim dengan urbanisasi dalam suatu periode tertentu.

### **c. Bencana Alam**

Gejala alam lainnya yang menentukan terhadap perubahan lingkungan fisik adalah gempa bumi, baik gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi, sedangkan gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh proses gerakan pada kerak bumi. Gempa tektonik yang terjadi di Indonesia terutama banyak terjadi di daerah-daerah pantai selatan, yaitu daerah patahan bumi. Baik gempa vulkanik maupun gempa tektonik dapat mengubah lingkungan fisik. Letusan gunung berapi dapat mengubah struktur lingkungan fisik, misalnya letusan gunung mengubah sebuah kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang subur, lahan pertanian atau aliran sungai menjadi daerah penggalian pasir, dan lain-lain.

### **d. Perubahan Permukiman**

Perubahan lingkungan fisik berupa lingkungan permukiman penduduk dapat menjadi tema dalam penulisan geografi sejarah. Hal yang diteliti adalah bagaimana proses terjadinya permukiman tersebut. Pada umumnya lahirnya permukiman lebih banyak

disebabkan oleh aktivitas manusia, biasanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Pertumbuhan ekonomi akan berakibat penambahan penduduk. Pertambahan penduduk akan berakibat timbulnya kebutuhan tempat tinggal. Pembangunan tempat tinggal membutuhkan lahan sehingga banyak terjadi perubahan lahan, yang semula merupakan lahan pertanian berupa sawah dan perkebunan, berubah menjadi tempat permukiman atau perumahan penduduk. Dengan demikian penelitian yang dapat dilaksanakan adalah mengkaji hubungan lahan permukiman dengan pertumbuhan ekonomi.

### **2.3 Kajian Lingkungan Sosial Budaya**

Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang terdiri dari orang-orang, baik secara individu maupun kelompok, yang berada di lingkungan sekitar manusia yang memiliki corak kehidupan sosial budaya, baik bersifat homogen maupun heterogen. Dalam lingkungan sosial budaya akan tampak berbagai aktivitas manusia dalam suatu komunitas tertentu. Manusia yang hidup dalam lingkungan sosial budaya menggambarkan suatu kehidupan kolektivitas manusia. Dalam kolektivitas kehidupan manusia terdapat sistem pembagian kerja, kerja sama, dan komunikasi. Manusia yang hidup secara kolektif dalam suatu lingkungan sosial budaya akan membentuk suatu masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Interaksi tidak hanya dilakukan antarmanusia, tetapi juga berlangsung antara manusia dan alam. Seperti halnya interaksi antarmanusia, dalam interaksi manusia dengan alam pun akan terbentuk suatu pola tindakan tertentu. Dalam penulisan geografi sejarah berbagai pola tindakan manusia merupakan aspek yang perlu diteliti. Penelitian yang dilakukan menyangkut bagaimana perubahan yang terjadi dalam berbagai pola tindakan manusia dalam dimensi ruang dan waktu. Pola-pola tindakan yang diteliti menyangkut mata pencarian, agama dan kepercayaan, sistem politik, dan lain-lain.

Untuk meneliti geografi sejarah dalam konteks lingkungan sosial budaya terlebih dahulu dirumuskan kerangka konsep mengenai hubungan manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam, secara garis besar dapat dilihat dari tiga konsep yaitu, pertama, lingkungan alam yang sangat menentukan atau mempengaruhi manusia atau disebut konsep *environmental determinism*; kedua, manusia yang mempengaruhi lingkungan alam atau disebut *environmental possibilism*; dan ketiga, interaksi antara manusia dan lingkungan alam atau disebut *cultural ecology*.

Konsep *environmental determinism* tidak semuanya berlaku. Konsep *environmental possibilism* yang berfokus pada *limiting* atau *selective role*, berpandangan bahwa lingkungan sekitar tidak bersifat determinatif terhadap kebudayaan manusia, tetapi manusialah yang menentukan pilihan atas aspek-aspek lingkungan alam mana yang akan difungsikan dalam kehidupannya. Lingkungan memberi batas-batas terhadap tumbuhnya kebudayaan, tetapi tidak langsung menentukan

seluruh aspek kebudayaan. Misalnya, pertanian bersawah sebenarnya hanya dapat tumbuh di daerah yang curah hujannya tinggi. Akan tetapi, berdasarkan konsep *environmental possibilism*, pertanian dapat pula berkembang di daerah yang curah hujannya rendah bahkan di daerah yang panas. Hal ini dapat dilakukan karena manusia dengan kemampuan teknologi yang dimilikinya mengubah alam, yaitu teknologi irigasi.

Tema-tema yang dapat dijadikan kajian penelitian dalam lingkungan sosial budaya di antaranya sebagai berikut.

#### **a. Sistem Mata Pencarian Daerah Pedalaman dan Pesisir**

Sistem mata pencarian dilakukan oleh suatu masyarakat baik di daerah pedalaman maupun di pesisir. Karakteristik mata pencarian sudah barang tentu akan dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan alamnya. Pada lingkungan alam pedalaman atau pedataran, sistem mata pencarian manusia cenderung berbasis agraris. Sistem pertanian yang dikembangkan sangat bergantung pada struktur geografi di daerah darat. Pada daerah yang memiliki sungai dengan aliran air yang baik, akan dikembangkan pertanian bersawah. Sedangkan pada dataran tinggi yang tidak memiliki aliran sungai, lebih banyak dikembangkan sistem berladang atau berkebun. Tema kehidupan masyarakat agraris dapat menjadi penelitian dengan pendekatan geografi sejarah. Kajian yang dapat dilakukan antara lain proses munculnya kehidupan bertani, sistem pertanian, hubungan sosial antar kelompok petani. Untuk melakukan penelitian tersebut, aspek geografi ditempatkan sebagai faktor penentu terhadap perubahan



yang terjadi dalam kehidupan masyarakat agraris. Sistem mata pencarian pada masyarakat pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pedalaman. Pada umumnya sistem mata pencarian pada masyarakat di pantai adalah menangkap ikan.

Pada daerah kering atau curah hujannya rendah dapat diteliti mengenai pola pertanian dan hubungan sosial sesama petani.

### **b. Pelayaran dan Perdagangan**

Pelayaran dan perdagangan merupakan dua aktivitas yang saling berhubungan. Perdagangan yang dilakukan melalui pelayaran, banyak ditemukan pada masyarakat pantai. Secara historis, bentuk perdagangan ini timbul terutama sebelum dibangunnya sarana lalu lintas darat. Jalur laut merupakan jalur transportasi penting bagi kegiatan perdagangan. Pelayaran dan perdagangan di laut akan membentuk suatu kebudayaan pembuatan perahu. Bentuk perahu yang dibuat akan mencerminkan karakteristik masing-masing wilayah pantai. Perbedaan bentuk perahu menunjukkan perbedaan fungsi pelayaran. Perahu yang berlayar sampai laut lepas akan berbeda bentuknya dengan perahu yang berlayar pada jarak pendek.

Manajemen pelayaran yang dilakukan di atas perahu atau kapal laut yang berlayar akan menampakkan suatu struktur sosial yang khas. Pada masyarakat nelayan yang berlayar untuk menangkap ikan, terjadi pembagian kerja di antara sesama individu yang ikut berlayar tersebut. Begitu pula halnya dengan kapal yang berlayar untuk berdagang. Di dalam kapal itu terdapat pembagian peran di antara awak kapal. Pola pembagian kerja tersebut dapat memberikan penjelasan terhadap struktur sosial pada masyarakat pantai.

Kajian yang dapat dilakukan adalah awal munculnya masyarakat pantai, cara-cara menangkap ikan, hubungan kehidupan sosial masyarakat nelayan, jenis-jenis perahu, dan manajemen dalam penangkapan ikan.

### **c. Sistem Kepercayaan**

Siklus alam yang berpola tetap baik pada masyarakat pedalaman maupun maritim, memberikan pengetahuan kepada masyarakatnya. Pengetahuan ini bersifat alami atau bersumber dari pengalaman, bukanlah pengetahuan yang bersumber dari ilmu pengetahuan yang bersifat akademik. Bersumber dari pengetahuan itu, biasanya muncul suatu sistem kepercayaan masyarakat. Bentuk sistem kepercayaan itu biasanya berupa kepercayaan yang bersumber dari kekuatan alam. Kekuatan alam tersebut dipercayai oleh masyarakat sebagai kekuatan yang menentukan nasib kehidupannya. Misalnya pada masyarakat pertanian percaya terhadap Dewi Sri yang dipandang sebagai dewi pemberi kesuburan. Begitu pula halnya pada masyarakat pantai, khususnya di daerah pantai selatan Jawa, masyarakat memercayai adanya penguasa laut bernama Nyi Roro Kidul. Keberhasilan para nelayan dalam menangkap ikan dipercayai sebagai kemurahan Nyi Roro Kidul.

Tema penelitian yang dapat dilakukan adalah munculnya berbagai kepercayaan, pelaksanaan ritual, sistem kepercayaan, peralatan ritus dan upacara, umat/pemeluk kepercayaan, dan emosi keagamaan.

#### **d. Sistem Politik**

Karakteristik fisik lingkungan alam akan berpengaruh pula terhadap sistem politik yang muncul pada lingkungan alam tersebut. Aktivitas manusia dipengaruhi pula oleh faktor iklim atau cuaca. Menurut Hipocrates, kepribadian manusia pada daerah beriklim panas bersifat penuh gairah, berwatak keras, malas, harapan hidupnya singkat, tubuhnya ringan dan cerdas. Daerah yang beriklim sedang menurut Plato dan Aristoteles menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis, pada daerah yang beriklim panas pemerintahannya bersifat despotik, dan di daerah yang beriklim dingin bentuk pemerintahannya tidak jelas.

Di daerah pedalaman akan muncul kerajaan-kerajaan pedalaman. Sumber kekuatan ekonomi kerajaan tersebut berbasis agraris. Dalam contoh sejarah Indonesia, kerajaan yang berbasis agraris adalah Mataram Islam. Kerajaan ini dikenal sebagai pengekspor beras dalam jalur perdagangan di Kepulauan Nusantara dari abad ke-17 hingga abad ke-18, sedangkan di daerah pantai akan muncul kerajaan-kerajaan yang berbasis maritim. Sumber kekuatan ekonomi model kerajaan ini bersumber dari penguasaan terhadap pusat-pusat perdagangan di pantai. Hampir seluruh kerajaan Islam di Nusantara merupakan kerajaan maritim seperti Aceh, Samudera Pasai, Banten, Cirebon, dan Demak.

Tema penelitian yang dapat diangkat adalah munculnya kerajaan di suatu lingkungan, perkembangan dan proses keruntuhannya. Faktor lingkungan fisik, baik di lingkungan

pantai maupun pedalaman, harus ditempatkan sebagai faktor determinan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan kerajaan-kerajaan tersebut.

**e. Pola Konsumsi**

Pola konsumsi atau makan masyarakat dipengaruhi oleh faktor iklim dan lingkungan alam. Pada umumnya wilayah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Tradisi menggembala di padang rumput tidak begitu banyak. Akibatnya, makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia lebih banyak unsur protein nabati daripada protein hewani. Masyarakat Indonesia lebih banyak mengonsumsi nasi daripada jenis makanan pokok lain (sagu, jagung, ubi). Penelitian yang dapat dilakukan mengambil tema utama ini antara lain mengenai pola konsumsi masyarakat pada suatu lingkungan sosial tertentu, pilihan untuk mengonsumsi makanan tertentu, dan hubungan sosial dalam konteks pola konsumsi.

## Bab 3

# PERADABAN SEJARAH

### 3.1 Pengantar

Kajian tentang peradaban dapat dimulai dari suatu kondisi unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat yang sederhana sampai dengan masyarakat yang sudah memiliki kebudayaan yang canggih terus mengalami dinamika dan perkembangan yang berbeda satu tempat dengan tempat lainnya, yang tergantung pada kondisi geografis satu masyarakat berdiam. Peradaban dapat berubah secara cepat (revolutif) dan lambat (evolutif). Sebagai contoh, Anthony Reid (1993) melakukan kajian tentang wilayah laut dan daratan di Asia Tenggara kurun abad ke-15 - 17 M. Kajian sejarah tersebut memberikan gambaran yang menarik tentang peradaban maritim dan agraris penduduk yang tinggal di kawasan tersebut secara menyeluruh.

Perkembangan peradaban masyarakat boleh dikatakan terbentuk karena pengaruh lingkungan fisiknya, tetapi juga ditentukan oleh pilihan manusia ketika menghadapi lingkungan

geografisnya. Sebagai contoh, ada kelompok manusia yang melihat sungai dan laut yang membentang di hadapannya sebagai hambatan bagi kehidupannya karena mereka tidak dapat lagi berpindah tempat atau bermigrasi untuk mencari kehidupannya yang lebih baik. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang justru menjadikan sungai dan laut atau selat sebagai 'jalan raya' bagi aktivitasnya. Sebagai contoh masyarakat agraris di pedalaman Jawa Tengah masih memandang laut sebagai hambatan, sedangkan suku-suku maritim seperti orang Mandar, Madura, Lamalera, Bugis, dan Makassar di Sulawesi Selatan melihat laut sebagai 'jalan raya' bagi perahu-perahu mereka yang digunakan untuk menangkap ikan atau produk laut lainnya dan juga untuk mengangkut barang-barang dagangan yang akan dipertukarkan di tempat-tempat lain di seluruh pelosok kepulauan Indonesia.

Di wilayah Sumatera bagian tengah misalnya di Riau dan Jambi, peranan sungai sangat penting bagi aktivitas transportasi bagi penduduk pedalaman. Perdagangan dengan wilayah Sumatera Barat dan juga dengan kawasan pantai Jambi dan Riau sangat terbantu karena aliran sungai yang mengalir di wilayah tersebut. Begitu juga halnya yang terjadi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Selain itu masih banyak warga suku bangsa di Indonesia yang hidup di daerah pedalaman pulau-pulau dengan mata pencarian berburu dan meramu seperti kebanyakan penduduk Papua, Nias, dan Mentawai. Disamping itu, ada juga masyarakat peladang yang dikombinasikan dengan berburu dan meramu atau mengumpulkan hasil hutan. Masyarakat keladang, berburu, dan

meramu ini, misalnya masyarakat Suku Bukit di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, suku Dayak lainnya di Kalimantan, Suku Baliem (Dani) di pedalaman Jayawijaya, Papua, dan Suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, pantai barat Sumatera Barat, tentunya akan berbeda peradabannya dengan masyarakat agraris di Jawa dan Bali ataupun masyarakat maritim, seperti Bugis, Makassar, Mandar, Lamalera, dan Madura.

Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan dan dinamika kebudayaan masyarakat di Indonesia melahirkan enam tipe masyarakat, yaitu 1) masyarakat pemburu dan peramu; 2) masyarakat nelayan atau maritim; 3) masyarakat peladang; 4) masyarakat peternak, 5) masyarakat petani-sawah; 6) masyarakat perkotaan.

Berdasarkan enam kategori tersebut, kajian tentang peradaban dapat dilakukan untuk merekonstruksikan peradaban masyarakat yang hidup dalam kawasan geografis tertentu. Namun, sering kali pada masa lalu ataupun sekarang ditemukan kondisi peradaban yang saling bertumpuk atau terjadi kombinasi satu atau beberapa kategori yang menjadi ciri peradaban sekelompok masyarakat, seperti yang terdapat pada masyarakat di Jawa, Sulawesi Selatan, kepulauan Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku, dan di kawasan Pulau Sumatera. Untuk kondisi masyarakat peternak di Nusa Tenggara Timur akan dijadikan satu dengan masyarakat peladang, karena pada dasarnya mereka hidup dalam dua kategori tersebut. Untuk lebih jelasnya tiap bagian akan diuraikan lebih lanjut.

### 3.2 Masyarakat Pemburu dan Peramu

Kelompok masyarakat ini memiliki sistem ekonomi pengumpulan pangan. Di beberapa tempat di Indonesia, penduduk dalam kategori ini terutama di wilayah Papua, Kalimantan, pedalaman Sumatera, Kepulauan di pantai barat Sumatera, seperti Nias, Mentawai, Siemeleu, Banyak dan beberapa kepulauan di Nusa Tenggara Timur. Selain berburu binatang, beberapa suku bangsa yang berdiam di pantai-pantai utara dan barat daya Papua hidup dari mencari umbi-umbian, hasil hutan, dan meramu pohon sagu untuk mendapatkan tepung sagu yang digunakan sebagai sumber makanan pokok. Begitu juga dengan masyarakat di Sawu dan Roti yang hidup dari meramu dan mengolah air nira dari pohon lontar yang menjadi bahan pembuatan tuak, sirop gula lontar (cairan gula nira), dan gula lontar. Bahkan di dua tempat terakhir, cara makan pada kelompok suku yang berdiam di pulau tersebut adalah meminum.

Dalam kajian terhadap masyarakat pemburu dan peramu yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Legenda dan asal-usul penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Sebagai contoh kepercayaan orang Asmat di Papua, bahwa mereka diciptakan dari patung kayu yang dibuat oleh makhluk nenek moyang yang mereka sebut *Fumeripits*. Ia juga mengajarkan membuat rumah panjang mereka (*je*), tifa (sejenis kendang), dan perahu.
- b. Mendeskripsikan keadaan geografi, iklim, dan demografi pada wilayah yang hendak dijadikan daerah kajian.



- c. Sistem religi masyarakat dan upacara ritus peralihan atau upacara daur hidup sejak seseorang lahir sampai setelah kematiannya dan upacara untuk melakukan aktivitas perburuan atau meramu sagu atau lontar. Sebagai contoh orang Sawu dan Rote percaya bahwa dewa mereka mengirim gula lontar dengan perahu suci kepada mereka sehingga mereka selalu membuat upacara ketika akan menyadap dan memasak nira.
- d. Sistem hak ulayat hutan sebagai daerah perburuannya atau hutan yang produknya dapat diramu menjadi bahan makanan atau komoditi perdagangan, seperti hutan sagu di Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua, serta hutan lontar di sawu, Rote, Timor dan Sumba.
- e. Jenis dan bentuk rumah masyarakat.
- f. Luas daerah perburuan dan ekologi tanaman penghasil makanan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat, seperti luas hutan sagu atau hutan lontar dan sebagainya dan pola-pola migrasinya.
- g. Jenis senjata dan teknologi berburu dan meramu, dapat berupa senjata untuk memotong, memukul, dan dilontarkan atau ditusukkan (tombak, panah).
- h. Jenis-jenis wadah yang mereka buat untuk kegiatan berburu dan meramu atau hasil-hasil barang kerajinan yang dihasilkan masyarakat setempat, seperti anyaman keranjang dari kulit kayu atau bahan serat lainnya, pembuatan patung, alat musik.
- i. Teknologi untuk meramu hasil tanaman tertentu dan jenis tanaman yang tumbuh di hutan (sagu, lontar, kelapa, kayu cendana, rotan, kayu sapan, kapur barus dan lain lain).

- j. Hasil-hasil perburuan dan peramuhan, seperti daging asap, dendeng, gula lontar, tuak, gula kelapa, tepung sagu, kapur barus, kayu cendana, kayu sapan, kulit binatang, lilin lebah, sarang burung, dan tanduk atau tulang binatang.
- k. Menelusuri penamaan istilah lokal untuk hal-hal yang terkait dengan kegiatan perburuan dan meramu dan juga penamaan wilayahnya, seperti nama yang diberikan oleh penduduk terhadap pulau-pulainya, misalnya yaitu, *Rai Hawu* untuk Pulau Sawu dan *Lote do Kale* untuk Pulau Rote.
- l. Hubungan dengan penduduk dari luar wilayah atau pendatang asing dan perubahan sosial budaya yang terjadi.
- m. Jenis alat transportasi masyarakat di darat, sungai, dan antarpantai, seperti penggunaan kuda, jalan kaki, gerobak, atau perahu lesung.
- n. Sistem kesenian yang ada dalam masyarakat peladang, seperti syair-syair, mantra-mantra, seni tari, dan seni kerajinan.

### 3.3 Masyarakat Peladang dan Peternak

Bercocok tanam di ladang dilakukan masyarakat baik di lingkungan hutan rimba daerah tropis maupun sub-tropis. Sistem ini disebut *shifting cultivation* atau *slash and burn cultivation*, *swidden*, *land rotation* dan sebagainya. Sistem perladangan tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagian kecil di Jawa. Ladang merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia dan Malaysia. Namun, beberapa wilayah memiliki istilah sendiri untuk ladang, seperti *huma* di Jawa Barat, *juma* di Sumatera, dan *umai*

di Kalimantan. Sementara itu masyarakat peternak di Nusa Tenggara Timur, selain hidup dari peternakan juga hidup dari sistem perladangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan kajian terhadap masyarakat peladang dan peternak adalah sebagai berikut.

- a. Legenda tentang asal usul kelompok masyarakat di wilayah tersebut.
- b. Deskripsi demografi (kependudukan), iklim, sistem kekerabatan, dan sistem sosial masyarakat setempat.
- c. Sistem religi masyarakat setempat dan ritus peralihan hidup masyarakat atau upacara daur hidup sejak kelahiran sampai dengan setelah kematian warga suku tersebut.
- d. Kosmologi dan mitologi yang berkaitan dengan sistem perladangan. Sebagai contoh Orang Bukit di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, meyakini bahwa perladangan merupakan pekerjaan suci yang sejak lama dilakukan oleh para dewa.
- e. Sistem hak ulayat wilayah hutan yang dipakai sebagai daerah perburuan dan perladangan serta sistem kepemilikan areal hutan yang hendak dijadikan perladangan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Baduy, Banten Selatan, dikenal sistem *ngeblok* yaitu lahan yang dipergunakan untuk kepentingan bersama. Untuk masyarakat peternak perlu dijelaskan tentang hak ulayat padang rumput (*sabana*).
- f. Jenis dan bentuk rumah dalam masyarakat perladangan dan peternak. Sebagai contoh rumah ladang 'sapou' di Mentawai.

- g. Tanda-tanda gaib yang dibaca oleh dukun karena mimpi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan lahan yang hendak dibuka.
- h. Bagaimana teknik membuka ladang, siapa yang melakukannya, dan menggunakan peralatan apa?
- i. Cara bercocok tanam: dicangkul, dibajak, atau langsung ditanami dengan membuat lubang dengan tongkat, termasuk sejumlah peralatan yang dibuat oleh para peladang, seperti alat pemotong rumput, penggali tanah, lesung untuk mengupas padi ladang, tempat penyimpanan padi ladang atau umbi-umbian atau jenis tanaman lainnya. Pekerjaan lain dengan mengumpulkan hasil-hasil hutan, misalnya hasil hutan yang dapat diperoleh seperti getah barus atau kapur barus dari hutan-hutan di Barus dan Singkil, rotan di Kalimantan dan Sumatera, serta lilin lebah dan sarang burung di Sumba, Sumbawa, dan Flores.
- j. Bagaimana bentuk upacara religi pada waktu panen dan setelah panen. Di daerah Ngada, Flores, mereka mengadakan upacara untuk dewi padi ladang mereka, yaitu untuk *pare* (padi) *mbu*. *Ine mbu* adalah sosok wanita yang menjelma menjadi padi ladang menurut kepercayaan masyarakat di sana.
- k. Istilah-istilah lokal yang terkait dengan sistem perladangan dan peternak, seperti jenis-jenis tanaman, dan nama-nama peralatan.
- l. Sistem kesenian yang ada dalam masyarakat ladang, seperti syair, mantra, seni tari, seni kerajinan, dan seni tenun.

- m. Jenis alat transportasi penduduk baik di darat, sungai maupun antarpantai.
- n. Fungsi binatang ternak dalam masyarakat Flores dan Timor sebagai mas kawin, lambang kekayaan, dan status.
- o. Kekuasaan lokal seperti pada Kerajaan Cibai di Manggarai, Flores Tengah yang muncul sejak abad ke-17.
- p. Hubungan dengan penduduk dari luar wilayah atau pendatang asing dan perubahan sosial budaya yang terjadi.

### **3.4 Kajian Masyarakat Maritim**

Kelompok masyarakat maritim biasanya tinggal di perkampungan di sepanjang pantai, teluk, atau muara sungai. Mereka hidup dengan cara mengolah hasil laut dan perdagangan antarpulau atau wilayah. Beberapa hal menarik yang perlu diperhatikan adalah bahwa karakter budaya maritim ditentukan oleh unsur-unsur kedudukan geografinya yang dekat dengan laut, bentuk tanah dan pantainya, wilayah daratan yang menghasilkan komoditi perdagangan, budaya maritim masyarakat, penduduk yang hidup dari mengolah hasil laut, dan kebijakan politik yang mendukung eksplorasi ke laut.

Berdasarkan unsur tersebut, dapat dipetakan suku-suku bangsa manakah di Indonesia yang memiliki semua atau sebagian dari unsur tersebut dan dilakukan penelitian baik kearsipan pustaka maupun lapangan yang menggunakan sumber-sumber sejarah lisan.

Adapun tema-tema yang dapat dijadikan pokok kajian adalah sebagai berikut.

- a. Kosmologi, mitologi, legenda dan tradisi lisan yang berkenaan dengan laut, asal usul nama tempat dan tanda-tanda alam untuk memprediksi cuaca. Sebagai contoh, tokoh mitos Sawerigading dalam masyarakat Bugis yang menjelajahi perairan Nusantara dengan armada perahunya pada masa lalu, mitos tentang pelayaran nenek moyang orang Lamalera di Pulau Lembata asal Luwuk, Sulawesi Selatan, yang ikut dalam pelayaran armada Majapahit ke Maluku dan Nusa Tenggara. Membuat deskripsi geografi pantai dan laut yang menjadi tempat tinggal masyarakat maritim seperti membuat catatan tentang satuan-satuan perairan yang menjadi wilayah eksplorasi masyarakat maritim, seperti pantai-pantai, laut lepas, muara-muara sungai, teluk dan juga sungai-sungai yang menjadi penghubung wilayah pedalaman dengan daerah pantai, termasuk juga mendeskripsikan iklim, sistem angin, dan demografinya.
- b. Pengaruh kedatangan bangsa Eropa terhadap dunia pelayaran dan perdagangan masyarakat maritim lokal serta migrasi masyarakat maritim.
- c. Aspek kesenian dari budaya masyarakat maritim, seperti seni tari, musik, seni rupa, seni tenun, kerajinan, dan busana yang terkait dengan tradisi maritim.
- d. Teknologi perkapalan dan pelayaran, meliputi penggunaan tiang-tiang layar dan layarnya, bentuk perahu, tonase,

- persenjataan, peralatan penangkap ikan, sistem navigasi, peta, peralatan membuat perahu dan jalur-jalur pelayaran.
- e. Organisasi pelayaran, seperti pembagian tugas kerja dan pembagian hasil keuntungan, seperti di Bugis dan Makassar disebut *Amanna Gappa*; sistem pajak dan upeti.
  - f. Migrasi karena bencana alam, seperti tsunami (ibeuna-Aceh), cerita mitos tenggelamnya Pulau Lelan Batan yang menjadi tempat tinggal nenek moyang orang Lamalera, cerita banjir besar atau tsunami yang menghanyutkan orang Bajo (berasal dari kata *bajo-bajo* atau bayang-bayang dari orang-orang yang terseret air bah atau banjir).
  - g. Deskripsi tentang pasar-pasar lokal dan jenis-jenis komoditi yang diperdagangkan, baik produk dari pedalaman atau hasil laut yang mereka eksplorasi. Sebagai contoh, lada menjadi mata dagangan ekspor kerajaan Banjar sehingga Babad Banjar mencatat bahwa lada adalah 'dagangan negri'. Selain itu ada contoh upeti (*wase*) atau pajak yang dikenakan terhadap jual beli di pasar (pekan) Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.
  - h. Sistem hak ulayat laut dan mekanisme adat yang mengaturnya terkait sistem pengelolaan sumber daya laut yang menggambarkan rumitnya usaha adaptasi yang dilakukan manusia dengan lingkungan laut sekitarnya. Juga gambaran tentang kearifan masyarakat yang melakukan pengaturan untuk tidak merusak laut dan habitatnya.
  - i. Kekuasaan politik, baik di tingkat lokal maupun kesultanan atau kerajaan.

### 3.5 Kajian Masyarakat Petani-Sawah

Di Indonesia sistem bercocok tanam padi di sawah atau agraris umumnya terdapat di Jawa, Bali, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Lombok dan Sumbawa. Peradaban agraris telah melahirkan peradaban yang maju di Jawa dan Bali. Hal itu dapat dilihat dengan adanya peninggalan kerajaan Mataram Hindu, Syailendra, Kediri, Majapahit, Pajajaran dan banyaknya kerajaan yang muncul dan berkembang di Bali sejak abad ke-10 sampai dengan awal abad ke-20. Kajian tentang sejarah pertanian dan perdesaan juga bisa dilakukan sejak masuknya bangsa Barat, terutama eksploitasi kolonial Belanda yang sejak awal abad ke-19 memberlakukan kebijakan *Cultuurstelsel* atau sistem perkebunan yang dipaksakan kepada penduduk Jawa dan Sumatera sebagai kewajiban membayar pajak, sedangkan sejak tahun 1870, sejak dikeluarkan Undang Undang Agraria, muncul sistem perkebunan swasta (ekonomi liberal) yang sangat mempengaruhi perubahan masyarakat terutama di Jawa dan Sumatera. Kajian juga dapat dilanjutkan dari masa kemerdekaan sampai dengan saat ini.

Seperti halnya kajian peradaban maritim, kajian peradaban agraris juga dapat dilakukan dengan mendata poin-poin di bawah ini, dengan catatan bahwa setiap wilayah dengan pengaruh lingkungan geografi tertentu dapat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain.

Tema yang dapat diangkat berkaitan dengan peradaban maritim adalah sebagai berikut.

- a. Legenda tentang asal-usul masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Sebagai contoh penduduk pertama pulau Jawa adalah orang Rum dan para penguasa Jawa berasal dari



dewa-dewa Hindu dan nabi-nabi Islam, atau orang Bali yang percaya sebagai keturunan masyarakat kerajaan Majapahit dari Jawa Timur.

- b. Deskripsi demografi, kepercayaan tentang keberhasilan dan kegagalan panen, membuat deskripsi geografi wilayah masyarakat agraris, seperti membuat catatan tentang satuan-satuan tanah yang dijadikan areal persawahan, karena setiap wilayah memiliki nama-nama yang khas bagi peruntukan tanah.
- c. Religi, kosmologi, dan mitologi yang berkenaan dengan masyarakat agraris. Misalnya cerita tentang Pohaci Sanghyang Sri (Sunda), dan kepercayaan tentang dewi padi di tempat lain.
- d. Peralatan yang diperlukan untuk bercocok tanam sesuai dengan pencapaian peradaban.
- e. Aspek kesenian dari budaya masyarakat agraris, seperti karya-karya sastra berupa tradisi tulis, tradisi lisan, mantra-mantra, seni tari, musik, seni rupa, dan busana (kain batik dengan beragam motif) yang terkait dengan tradisi agraris.
- f. Teknologi yang dipakai untuk mengolah tanah, pada saat panen, dan setelah panen, termasuk peralatan yang dihasilkan, peralatan membuat tekstil atau tenunan.
- g. Perkembangan kota-kota di pedalaman yang bertumpu pada ekonomi pertanian atau agraris, masalah demografi, aspek pelapisan sosial penduduknya (bangsawan, priyayi, orang bebas, *to maradeka* dalam masyarakat Bugis dan Makassar), aspek sosial dan militer yang bertumpu pada kekuatan prajurit

- darat, dan segregasi (pembagian atau pemisahan) penduduk berdasarkan etnis atau profesinya, misalnya di kota-kota di pedalaman Jawa Tengah terdapat kampung *pandean* (tukang pande besi/kerajinan), *pejagalan* (tempat pemotongan hewan, *tamtaman* (kampung prajurit), *loji* (tempat tinggal orang Eropa), dan *kauman* (kampung santri).
- h. Pertumbuhan pasar-pasar desa, di Jawa dikenal hari pasaran (buka pasar pada hari tertentu), seperti Pon, Wage, Kliwon, Paing dan Legi (di Sunda disebut Manis).
  - i. Munculnya kekuasaan politik lokal sampai kerajaan besar seperti Majapahit, Mataram Islam, dan banyak kerajaan di Bali.
  - j. Sistem pertanian dan kehidupan petani sebelum dan sesudah kedatangan bangsa Barat, sampai abad ke-18.
  - k. Pengaruh sistem *Cultuurstelsel* dan sistem ekonomi liberal terhadap kehidupan masyarakat petani di Jawa dan Sumatera.
  - l. Jenis-jenis alat transportasi di daerah pertanian dan perkebunan, penggunaan gerobak sapi, kereta api yang menghubungkan Semarang-Solo-Yogyakarta (di Jawa Tengah sejak akhir tahun 1860-an sudah dikenal alat transportasi ini).
  - m. Sistem pemerintahan di wilayah swapraja (*Vorstenlanden*), Yogyakarta dan Surakarta, termasuk hubungan antara tuan tanah (bangsawan, priyayi) dengan para cacahnya (petani penggarap), sistem pajak atau upeti, dan sistem bagi hasilnya.
  - n. Pemberontakan yang dilakukan oleh petani terhadap kekuasaan kolonial yang menekan mereka dan fenomena perbanditan atau kejahatan sosial di perdesaan.

### **3.6 Kajian Masyarakat Perkotaan**

Kota di Indonesia pada awalnya tumbuh sebagai pusat politik dari kerajaan-kerajaan pada masa lalu. Namun, karena sedikitnya peninggalan yang bertahan hingga sekarang, kajian terhadap perkotaan belum begitu berkembang.

Untuk mengenal kota, perlu dikemukakan beberapa definisi tentang kota dan perkotaan. Kota adalah suatu permukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kepadatan wilayah nasional, dengan struktur mata pencarian nonagraris (jasa), industri, tata guna tanah yang beraneka ragam, serta gedung-gedung yang berdiri berdekatan.

Di wilayah Asia Tenggara, termasuk wilayah Kepulauan Nusantara (Indonesia), tumbuh kota-kota tipe praindustri dengan masyarakat feodal di pedalaman dan pesisir pantai sebagai pusat politik kerajaan lokal dan kota-kota bawahannya (kadipaten di Jawa). Kemudian kota-kota di Indonesia berkembang sejalan dengan proses kolonisasi. Pada masa itu kota-kota tumbuh di sekitar benteng militer, pos perdagangan, serta pusat-pusat politik dan administratif.

Perkembangan kota di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan sejak abad ke-15 akibat perkembangan perdagangan antarwilayah dan benua. Pada waktu itu kota-kota pelabuhan di tepi pantai dan kota dagang di tepian sungai besar berkembang pesat menggeser pusat-pusat kota pedalaman yang agraris. Sebagai contoh kota Banten, Cirebon, Demak, Jepara, dan Tuban berkembang pesat selama abad ke-16.

Untuk meneliti sejarah peradaban kota perlu diperhatikan hal-hal berikut.

- a. Legenda tentang pendirian kota atau sejarah pendirian kota yang tercatat dalam naskah-naskah tradisional, dokumen kolonial, dan pemerintah RI (setelah kemerdekaan). Sebagai contoh, pendirian kota (Keraton) Surakarta di Desa Solo oleh Sunan Paku Buwono II (1726-1749) terdapat dalam naskah *Babad Giyanti*.
- b. Deskripsi tentang demografi (kependudukan), kalau tidak ada data sensus tentang jumlah penduduk kota, bisa diperkirakan dari catatan-catatan sejarah tentang jumlah rumah, jumlah korban akibat wabah yang melanda kota tersebut, dan jumlah prajurit dalam kota.
- c. Adanya filosofi kosmis tentang pembangunan dan pembentukan kota karena pengaruh sistem kepercayaan Hindu dan Buda, konsep mikrokosmos dan makrokosmos.
- d. Pemisahan tempat tinggal berdasarkan kesukuan atau bangsa. Misalnya, adanya kampung-kampung tempat tinggal yang menggunakan nama-nama suku dan orang asing di Jakarta (Kampung Melayu, Kampung Bali, Manggarai, dan lain lain). Di Aceh ada Kampung Burma dan Kampung Jawa, di Banten ada Kampung Pecinan dan Dermayon (Indramayu).
- e. Pemisahan tempat tinggal berdasarkan profesi, seperti Kampung Pande (tukang) di Aceh, Pandean di Yogyakarta, Pejagalan (tempat pemotongan hewan), Kampung Pamarican (kampung pedagang merica atau lada di Banten), dan di Cirebon ada Kampung Panjunan (tempat pembuatan anjun/periuk).

- f. Penamaan tempat tinggal karena menjadi markas tentara atau prajurit (Kampung Ksatrian dan Tamtaman di Yogyakarta dan Surakarta), Kampung Kademangan (tempat tinggal pejabat administrasi), dan kampung kauman di banyak kota di Jawa (tempat tinggal golongan santri)
- g. Deskripsi tentang nama-nama benteng kerajaan lokal atau kekuasaan kolonial, sebagai contoh benteng Panakukang dan Sombaopu di Makassar, benteng Surosowan di Banten, benteng Jagaraga di Bali, Benteng Bonjol di Sumatera Barat. Contoh tentang benteng kekuasaan kolonial dapat dideskripsikan Benteng Speelwijck di Banten, Benteng Fort Hendricus di Lohayong, Solor, dan sebagainya.
- h. Jenis-jenis bangunan untuk tembok kota atau benteng dari kayu, bambu, batu karang atau batu bata. Menurut laporan pelaut Belanda tahun 1596, bangunan benteng kota di Banten, Cirebon, Demak, dan Tuban sudah menggunakan tembok bata, sedangkan benteng Jayakarta dan Jepara masih menggunakan kayu.
- i. Deskripsi tentang jenis-jenis pasar di kota pedalaman atau pantai dan komoditi yang diperdagangkan.
- j. Industri kecil dan kerajinan, kain, perkakas logam, porselin, serta tembikar.
- k. Sistem administrasi perkotaan oleh kerajaan pedalaman, maritim, penguasa kolonial, serta sistem pemerintahan kota masa republik.
- l. Arsitektur bangunan kota (kota tradisional dan kolonial).
- m. Sistem administrasi pelabuhan di kota-kota pantai dan tepi sungai.

### **3.7 Penutup**

Kajian sejarah peradaban di Indonesia masih belum dilaksanakan dengan sempurna, padahal tema-tema yang berkenaan dengan hal itu cukup luas serta beraneka. Uraian dalam bab ini hanya merupakan contoh yang dapat dijadikan dasar untuk dikembangkan dalam tema penelitian yang lebih spesifik.

## Bab 4

# KAJIAN DINAMIKA PENATAAN WILAYAH

### 4.1 Pengantar

Penataan wilayah yang dimaksudkan dalam pedoman ini berkenaan dengan hasil “pemekaran wilayah”, atau tepatnya pemecahan wilayah administrasi, termasuk penyusutan wilayah. Artinya, penggabungan beberapa wilayah kecil dalam satuan administratif menjadi satu kesatuan besar. Walaupun proses kedua tersebut agak jarang terjadi, sebagai hasil perkembangan sejarah tetap harus diperhatikan. Uraian berikut ini dapat dianggap sebagai pedoman bagi para peneliti dalam melakukan kajian terhadap pemekaran/penggabungan wilayah administratif tertentu.

Dalam perjalanan sejarahnya suatu satuan wilayah administratif tertentu, apabila dikehendaki, dapat dipecah menjadi satuan-satuan administratif kecil untuk membentuk satuan administratif yang lebih luas berdasarkan alasan sejarah ataupun

alasan lainnya yang berkembang pada masa sekarang. Semua argumen tersebut harus diperhatikan secara saksama oleh para peneliti dalam bidang ini apabila menginginkan hasil kajian yang cukup memadai. Dengan demikian telah terjadi suatu dinamika atau perubahan dalam penataan wilayah, suatu dinamika yang terjadi akibat kebudayaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Dalam perkembangan waktu, wilayah yang diampu oleh suatu sistem administratif tertentu akan berubah-ubah, meluas ataupun menyempit, sangat bergantung pada sejumlah faktor. Dalam upaya menyusun suatu historiografi geografi sejarah Indonesia, faktor-faktor itu layak diperhatikan mengingat Indonesia mempunyai keragaman budaya, latar belakang sejarah, konsepsi tradisional, dan aspek lainnya yang turut membentuk argumentasi bagi pemekaran atau penggabungan wilayah.

## **4.2 Kajian tentang Dinamika Penataan Wilayah**

Kajian geografi sejarah yang berkenaan dengan dinamika penataan wilayah dimaksudkan untuk meninjau dan menjelaskan suatu peristiwa penggabungan ataupun pemecahan (pemekaran) wilayah pada masa lalu. Kajian tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk memberi legitimasi atau mengesahkan terjadinya proses penggabungan ataupun pemekaran wilayah. Hal yang dipaparkan merupakan hasil kajian yang diungkap



berdasarkan data. Tafsiran-tafsiran yang dilakukannya pun harus bertumpu pada data yang tersedia, bukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi peneliti.

Hasil penelitian tentang penggabungan wilayah—justru yang sering terjadi adalah pemekaran wilayah—selanjutnya divisualisasikan dalam wujud peta tematik. Dalam peta hasil kajian geografi sejarah mengenai pemekaran wilayah sudah barang tentu digambarkan adanya ruang geografi mengenai wilayah tertentu yang semula masih merupakan satu kesatuan wilayah utuh, kemudian dipecah (dimekarkan) menjadi dua atau lebih satuan wilayah administrasi. Peta tersebut antara lain memuat informasi tentang (a) batas-batas wilayah baru dengan wilayah induknya, serta wilayah lain tetangganya; (b) keluasan wilayah yang baru dimekarkan dan sisa keluasan wilayah induknya, dan (c) relief permukaan tanah wilayah yang baru dimekarkan, misalnya berapa persen wilayah yang berupa dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi, pegunungan, dan lain sebagainya. Butir (c) bukan sepenuhnya hasil penelitian geografi sejarah, karena dapat memanfaatkan data informasi tentang gambaran peta geografi umum.

Kajian kesejarahan tersebut sudah barang tentu meliputi pertanyaan dasar: apa, di mana, bilamana, mengapa terjadi, dan siapa tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan penjelasan tentang terjadinya penggabungan atau pemekaran wilayah. Hasil Kajian itu dilengkapi dengan peta hasil penggabungan ataupun pemekaran wilayah yang telah terjadi.

### **4.3 Berbagai Argumen Pemekaran Wilayah**

Pemekaran atau penggabungan wilayah dapat dipandang dari beberapa aspek yang bertalian dengannya. Dua aspek penting yang berkenaan dengan hal tersebut ialah (a) sistem politik pemerintahan dan (b) adat-istiadat, norma, hukum adat dan lainnya yang bernuansakan budaya. Dalam membahas pemecahan suatu wilayah tertentu, yang perlu diperhatikan adalah alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Alasan tersebut kerap kali diungkapkan dalam keputusan formal yang merupakan produk lembaga legislatif daerah tersebut. Namun, dalam pikiran para tokoh masyarakat anggota dewan, mungkin saja tersimpan alasan tertentu yang dirasakan dan diketahui bersama oleh seluruh warga masyarakat.

Dalam melakukan kajian terhadap meluas atau menyusutnya suatu wilayah tertentu diperlukan beberapa argumen yang harus diperhatikan. Argumen-argumen tersebut ada yang bersifat internal dan eksternal. Argumen internal lebih berkenaan dengan lingkup kebudayaan yang berkembang di wilayah tersebut beserta latar belakang sejarahnya yang turut membentuk kebudayaan yang didukung oleh masyarakat, sedangkan argumen yang bersifat eksternal lebih berkenaan dengan bermacam alasan yang dikaitkan dengan keadaan politik dan perkembangan masyarakat sekarang.

Argumen-argumen internal yang harus diperhatikan sebagai bahan kajian antara lain adalah sebagai berikut.

### **a. Data Artefaktual dan Monumen**

Ditemukannya lokasi makam kuna, arca-arca, masjid kuna, dan kebudayaan materi lainnya yang dihubungkan dengan kemasalaluan suatu daerah atau monumen peninggalan yang dihubungkan dengan tokoh yang membuka wilayah tertentu untuk dijadikan pemukiman dapat menjadi alasan bagi masyarakat suatu wilayah untuk memisahkan diri atau menggabungkan diri. Sebagai contoh, adanya kompleks makam Sunan Gunung Jati dan Gunung Sembung di utara kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) di puncak bukit Gunung Sembung yang ramai dikunjungi setiap waktu, apalagi pada hari-hari penting yang dianggap keramat. Para pengunjungnya terutama adalah penduduk di sekitar Cirebon, termasuk penduduk wilayah Kabupaten Indramayu, Kuningan, dan Majalengka yang merupakan bekas *tlatah* Kesultanan Cirebon (abad ke-15–17 M). Dengan demikian, monumen yang dikuduskan bersama itu dapat membuat penduduk wilayah Cirebon dan sekitarnya merasa senasib dan merasa dalam bingkai perkembangan sejarah yang sama.

### **b. Sumber Tertulis**

Sumber tertulis merupakan informasi dari masa lalu yang dituangkan dalam bentuk aksara dan rangkaian kalimat yang dapat dimengerti oleh para peneliti masa kini. Huruf yang dituliskan sebagai sumber informasi itu berupa aksara Pallava, Jawa Kuna, Bali Kuna, Sunda Kuna, Batak, Arab, Arab Melayu, Bugis, dan lain-lainnya.

### **c. Sumber Lisan**

Sumber lisan adalah bermacam uraian yang didapatkan dan berkembang dalam masyarakat bukan dalam bentuk tulisan, melainkan tuturan lisan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bentuknya dapat berupa dongeng, legenda, mitologi, yang semuanya masuk ke dalam jenis folklor.

### **d. Bahasa**

Perbedaan bahasa dapat dijadikan argumen untuk pemekaran (baca: pemecahan) wilayah administratif tertentu walaupun jarang terjadi. Yang sering dijadikan argumen pemisahan adalah dialek yang dianggap berbeda satu dengan lainnya. Dengan demikian, perbedaan dialek bahasa dapat dijadikan salah satu alat pengesahan bagi pemekaran wilayah.

### **e. Kekayaan Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam yang dianggap memadai di suatu wilayah juga merupakan argumen internal yang dijadikan alasan bagi pemecahan wilayah dalam sistem administratif yang berbeda. Sementara itu, wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya terbatas, warga masyarakatnya mungkin dapat menahan diri untuk tidak terburu-buru mengembangkan wacana pemekaran wilayah.

Hal-hal eksternal yang mempengaruhi juga terjadinya pemecahan wilayah adalah sebagai berikut.

### **a. Pertambahan Penduduk**

Bersama berjalannya waktu, penduduk yang menghuni suatu wilayah menjadi bertambah, artinya semakin banyak warga yang hidup dan berusaha di wilayah tersebut. Hal ini membawa konsekuensi semakin banyaknya warga yang harus diatur oleh pemerintah setempat. Apabila pemerintah setempat masih mampu untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat bertambahnya penduduk, tidak akan memunculkan suatu wacana pemecahan wilayah.

Lain halnya jika pemerintah dan juga warga masyarakat yang telah berkembang itu berkehendak untuk membagi wilayah tempat tinggal mereka, maka terjadilah pemekaran atau pemecahan wilayah. Alasannya agar pemerintah mudah mengatur masalah kependudukan. Contoh dalam tataran yang kecil ialah pemekaran kelurahan dan kecamatan di beberapa kabupaten di Jawa.

### **b. Luas Wilayah**

Erat kaitannya dengan pertambahan penduduk adalah masalah luasnya wilayah yang harus diampu oleh suatu pemerintahan. Wilayah luas dengan penduduk yang jarang sering kali tidak dijadikan alasan pemekaran atau pembagian wilayah. Sebaliknya, wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dapat dijadikan argumen bagi suatu wilayah untuk memecahkan diri.

Pemekaran itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem administrasi dan pelayanan pemerintahan terhadap warga

masyarakat. Sistem pelayanan administrasi pemerintahan yang terpusat di ibu kota pemerintahan yang memiliki wilayah luas bisa menyulitkan warga masyarakat jika hendak berurusan dengan birokrasi pemerintah, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pinggiran yang jauh dari pusat pelayanan administrasi pemerintahan.

### **c. Upaya Pemerataan Pembangunan**

Argumen eksternal yang sering mengemuka ketika suatu wilayah akan dimekarkan ialah upaya meratakan pembangunan di berbagai daerah. Argumen tersebut muncul ke permukaan manakala terdapat daerah tertentu dalam suatu wilayah merasa ditinggalkan atau diabaikan proses pembangunannya dibandingkan dengan daerah-daerah lain dalam wilayah yang sama. Diharapkan dengan dimekarkannya atau dipecahnya suatu wilayah dengan membentuk sistem pemerintahannya tersendiri, akan terjadi percepatan dan pemerataan pembangunan yang sama di daerah yang semula merasa ditinggalkan tersebut.

### **d. Kemajuan Industri**

Kemajuan industri yang mengelompok di daerah tertentu dapat dijadikan alasan dan pemicu terjadinya pemekaran wilayah. Apalagi ketika warga masyarakat di daerah tempat berkembangnya berbagai industri tersebut tidak merasakan manfaat ekonomis dari industri-industri yang ada di wilayahnya. Apabila hal itu yang terjadi, besar kemungkinan memunculkan kehendak untuk memekarkan diri dari wilayah yang telah ada.

### **e. Pengaruh Politik**

Dalam masa Indonesia modern perlu diperhatikan kekuatan-kekuatan politik yang turut mempengaruhi terjadinya pemekaran wilayah. Misalnya, pemekaran kabupaten dalam satu provinsi atau pemekaran provinsi induk menjadi dua atau tiga provinsi baru dapat terjadi karena keputusan politik.

Beberapa argumen, baik internal maupun eksternal merupakan alasan dimekarkannya suatu wilayah. Hal yang juga perlu dikemukakan adalah argumen-argumen tertentu yang dijadikan penyebab sehingga beberapa wilayah digabungkan. Dalam masa Indonesia modern, setelah kemerdekaan, penggabungan beberapa wilayah menjadi satu sangat langka dijumpai. Namun, dalam sejarah Indonesia peristiwa seperti itu pernah terjadi, misalnya penggabungan kerajaan Janggala dan Panjalu menjadi bagian inti dari Kerajaan Majapahit dalam abad ke-14—15 M, dan penggabungan kadipaten-kadipaten pesisir utara Jawa bagian tengah dan timur, seperti Surabaya, Tuban, Lasem, Jepara, Pati ke dalam kekuasaan kerajaan Demak dalam abad ke-16 M.

## **4.4 Pemekaran Wilayah Lepas Pantai dan Kepulauan**

Masalah yang perlu diperhatikan akibat pemekaran wilayah adalah pembagian wilayah dalam pengelolaan area lepas pantai dan konsep tentang “ruang samudera” (*ocean space*). Sebelum Provinsi Sulawesi Utara dimekarkan menjadi Sulawesi Utara dan

Gorontalo, pengelolaan Laut Sulawesi sampai batas 200 mil laut dari wilayah pantai utara wilayah Sulawesi Utara dilakukan oleh pemerintah provinsi tersebut. Setelah provinsi itu dimekarkan menjadi Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara, pengelolaan Laut Sulawesi pun dibagi menjadi dua. Hal yang sama terjadi pada Selat Makassar di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Semula, pemanfaatan Selat Makassar yang dekat dengan pantai Sulawesi hanya dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Tengah dan Selatan. Setelah provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat, pengelolaan Selat Makassar tersebut dilakukan oleh tiga pemerintahan, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

Konsep tentang “ruang samudera” dapat diartikan secara sederhana sebagai wilayah laut(an) yang kerap kali dilayari oleh kapal-kapal dari satuan administratif tertentu sehingga wilayah lautan(an) tersebut diakui secara bersama menjadi bagian atau milik wilayah satuan administratif yang kapal-kapalnya sering kali hilir mudik melayarinya, termasuk pulau-pulau yang berada di sepanjang jalur pelayaran kapal-kapal satuan administratif tersebut sampai wilayah yang terjauh dapat dikunjungi. Wilayah pulau-pulau berpenghuni dapat tetap menjadi wilayah provinsi induknya atau wilayah provinsi baru hasil pemekaran. Jika pulau-pulau itu tanpa penghuni, mungkin pembagiannya relatif mudah dengan melalui perundingan dan persetujuan antar- pemerintah provinsi. Lain halnya apabila pulau-pulau tersebut sudah ada penghuninya, maka yang terjadi adalah persetujuan tiga pihak, antara pemerintah provinsi induk, provinsi pemekaran dan



penduduk penghuni pulau-pulau. Suara yang wajib didengar sudah barang tentu yang berasal dari penduduk pulau-pulau tersebut.

Dalam hal ini juga harus diperhatikan kategori pelayaran yang selalu dilakukan oleh penduduk pulau-pulau yang bersangkutan. Terdapat tiga kategori, yaitu (1) *initiation journey*, pelayaran inisiasi untuk meneguhkan semangat bahari penduduk suatu pulau, (2) *exchange journey*, pelayaran untuk melakukan tukar-menukar barang dengan penduduk kampung atau sekutu yang terikat dalam suatu sistem pertukaran barang baik di pulau yang sama ataupun di pulau-pulau lainnya. Jadi, lebih bersifat pelayaran niaga yang bernilai ekonomis, dan (3) *refuge journey*, pelayaran untuk menyelamatkan diri dari bermacam bahaya. Dengan memperhatikan kategori pelayaran mana yang acapkali dilakukan penduduk serta tujuan pelayarannya, dapat ditafsirkan bahwa penduduk pulau-pulau tersebut lebih dekat dengan provinsi induk atau provinsi bentukan baru. Sudah tentu argumen-argumen internal yang telah diperbincangkan sebelumnya, terutama tradisi, bahasa, dan tradisi lisan mereka, juga wajib diperhatikan. Apakah mereka merasa lebih dekat dengan penduduk provinsi induk atautakah provinsi baru, hal itu akan memudahkan juga untuk memasukkan pulau-pulau tersebut kepada salah satu wilayah provinsi.

Demikian beberapa aspek yang selayaknya patut diperhatikan dalam mengkaji masalah pemekaran wilayah yang menyangkut wilayah perairan pantai dan pulau-pulau. Mungkin

saja terdapat pertimbangan lain yang juga harus dicermati untuk menghasilkan suatu simpulan yang lebih akurat, seperti keintensifan penduduk pulau-pulau berhubungan dengan masyarakat luar pulau, pengaruh pemerintah pusat (untuk pulau-pulau terluar), serta alasan politik dan pertahanan keamanan negara.

#### **4.5 Berbagai Argumen Penggabungan Wilayah**

Beberapa argumen yang sering menjadi alasan untuk menggabungkan wilayah antara lain sebagai berikut.

- (a) Wilayah-wilayah tertentu dikalahkan dalam peperangan sehingga digabungkan dengan wilayah pemenang perang.
- (b) Beberapa wilayah yang dalam berbagai hal setara, kemudian penduduknya secara sadar bersekutu dan akhirnya menggabungkan diri, tahap berikutnya dipilih atau disetujui secara aklamasi seorang pemimpin yang dianggap pantas untuk wilayah baru hasil penggabungan tersebut.
- (c) Terdapat wilayah yang dari berbagai perspektif dianggap lebih inferior dari wilayah tetangganya yang superior sehingga wilayah yang inferior tersebut secara sukarela menggabungkan diri kepada wilayah yang superior.

Dalam sejarah Indonesia, contoh untuk butir (a) adalah ketika Mataram Islam menaklukkan satu persatu wilayah Jawa bagian tengah dan timur yang masih merdeka dan belum bersedia

mengakui Senapati sebagai penguasa di Tanah Jawa. Oleh karena itu, ditaklukkanlah wilayah Pajang, Madiun, Demak, dan Pasuruan dalam abad ke-16 M. Contoh butir (b) dapat diambil dari sejarah kuna Hindu-Buddha di Jawa, bahwa dalam abad ke-8—10, raja yang memerintah sebenarnya adalah salah seorang dari penguasa wilayah *watak* yang paling berpengaruh yang disebut *rakai*. Dalam lingkup wilayah *watak* terdapat beberapa *wanua* (desa) yang dipimpin oleh seorang *rama* (kepala desa). Penduduk dan pemimpin *watak* kemudian secara sadar menggabungkan diri, lalu dipilihlah seorang *rakai* yang dianggap pantas untuk memerintah di wilayah gabungan berbagai *watak*. Tokoh itulah yang kemudian berjuduk Sri Maharaja. Adapun contoh butir (c) terjadi pada masa kejayaan Majapahit dalam abad ke-14 M. Menurut kitab Nagarakrtagama dan Pararaton, ketika Hayam Wuruk memerintah di Majapahit, banyak wilayah Nusantara yang secara sukarela mengakui kebesaran Majapahit, bahkan setiap tahun dari wilayah-wilayah itu datang utusan untuk mempersembahkan upeti kepada sang raja di istana Majapahit. Pada waktu wibawa Majapahit mulai pudar, wilayah-wilayah Nusantara yang semula mengakui panji-panji kebesaran Majapahit, satu persatu melepaskan diri lagi dari ikatannya dengan kerajaan tersebut.

Melalui kajian yang mendalam dapat dijumpai argumen lain serta contoh-contohnya yang lebih aktual perihal penggabungan wilayah. Dalam kajian geografi sejarah, setelah mengungkap masalah penggabungan wilayah pada masa

lampau, harus dilengkapi dengan visualisasi dalam peta sehingga akan terlihat wilayah yang semula mandiri kemudian bergabung atau digabungkan menjadi satuan wilayah yang lebih luas.

#### **4.6 Tahapan Kajian Dinamika Penataan Wilayah**

Dinamika penataan wilayah, baik berupa penggabungan wilayah-wilayah (kecil) menjadi satuan wilayah besar maupun pemecahan wilayah dari suatu wilayah induk telah terjadi sejak masa yang lampau. Kenyataan itulah yang harus disusun dalam bentuk historiografi sebagai akhir dari tahapan penelitian. Data yang digunakan dapat bermacam-macam bentuknya, tetapi semuanya harus berkenaan dengan tema utama yang menjelaskan terjadinya suatu penggabungan wilayah atau pemekaran wilayah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menelaah masalah penggabungan atau pemekaran wilayah pada masa lampau antara lain sebagai berikut.

- 1) Berbagai tinggalan sejarah/arkeologi yang bersifat fisik yang sekiranya dapat dijadikan data atau bukti untuk mendukung interpretasi dalam historiografi.
- 2) Pencarian dan Penelusuran sumber-sumber tertulis otentik yang masih tersedia hingga sekarang, seperti prasasti, karya sastra, hikayat, babad, tambo, kronik, arsip, dan peta kuna.
- 3) Jika memungkinkan dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber primer yang mengetahui dan mengalami suatu peristiwa penataan wilayah pada masa lampau, tetapi

wawancara tersebut hanya bisa berlangsung jika berkenaan dengan masalah penggabungan atau pemekaran wilayah yang tidak terlalu jauh dari masa kini.

- 4) Pengumpulan data lisan mengenai peristiwa penggabungan atau pemekaran wilayah yang terjadi pada masa lampau yang jauh dari masa sekarang, hanya dapat dilakukan melalui wawancara dengan narasumber sekunder, yaitu seorang ilmuwan atau seorang otodidak yang representatif serta dapat dipercaya pengetahuannya.
- 5) Mengumpulkan berbagai tradisi lisan (dongeng, legenda, dan mitos) dan bahasa-bahasa pengantar yang berkembang dalam masyarakat suatu wilayah yang sedang dikaji.
- 6) Jika memungkinkan dan masih dapat dilacak asal-usulnya, diperhatikan pula adat-istiadat, kebiasaan, bentuk kesenian, serta perilaku warga masyarakat yang berkenaan dengan sejarah masa lalu untuk mendukung proses penarikan interpretasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari pemekaran wilayah pada masa sekarang antara lain sebagai berikut.

- 1) Menelusuri kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah perihal pemekaran wilayah tersebut dalam bentuk surat-surat dan dokumen resmi.
- 2) Menelusuri argumen-argumen internal yang dijadikan alasan bagi pemekaran wilayah.
- 3) Menelusuri argumen-argumen eksternal yang sering dikedepankan oleh warga masyarakat agar usulan pemekaran wilayah tersebut dapat terlaksana.

- 4) Mencari tahu pendapat tokoh-tokoh yang setuju dan menolak terhadap upaya pemekaran wilayah tersebut.

Pedoman penyusunan penelitian ini bukanlah suatu petunjuk yang sempurna. Dalam penelitian di lapangan mungkin saja ditemukan sumber/data yang belum tercakup dalam uraian ini. Informasi dari lapangan yang khas suatu daerah itu harus tetap diperhatikan dan dihargai sebagai data yang dapat digunakan selama penelitian. Mungkin saja data khas suatu daerah hanya dapat dipakai untuk daerah itu dan tidak berlaku di daerah lain.

#### **4.7 Kajian Wilayah Perbatasan**

Wilayah perbatasan merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, sebab di wilayah tersebut terjadi perpaduan berbagai aspek kebudayaan. Wilayah perbatasan mempunyai pembatas jelas berupa unsur geografi, badan air (sungai, danau, selat), bukit, punggung pegunungan, dan batas alam lainnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meneliti wilayah perbatasan antara lain sebagai berikut.

- 1) Sumber-sumber lisan yang dikenal oleh penduduk di suatu wilayah perbatasan, misalnya legenda, mungkin juga dikenal oleh penduduk di wilayah yang berbeda, atau dengan kata lain, suatu legenda di wilayah seberang perbatasan juga dikenal oleh wilayah di seberang lainnya.

- 2) Penggunaan suatu bahasa yang melampaui perbatasan administratif yang telah ditentukan, misalnya sejumlah desa di wilayah Brebes (Jawa Tengah) yang penduduknya menggunakan bahasa Sunda. Hal itu dapat menjadi data untuk melakukan kajian selanjutnya, terutama migrasi atau keluasan wilayah penggunaan bahasa pada masa lampau.
- 3) Bentuk-bentuk kebudayaan di antara wilayah yang saling berbatasan itu mungkin sama. Dapat juga terjadi perpaduan dalam aspek kebudayaan tertentu (akulturasi), misalnya dalam arsitektur tradisional, ragam hias, kuliner, dan kesenian.
- 4) Terjadinya konflik fisik dan nonfisik. Dalam hal ini peneliti perlu mengungkap faktor-faktor terjadinya konflik nonfisik (misalnya yuridis, administratif, historis, ketimpangan ekonomi, dan ketidakmerataan pembangunan, serta aspek-aspek sosial budaya), dan faktor-faktor terjadinya konflik fisik yang terbuka (misalnya pergeseran tanda batas secara sengaja, masuknya para penyusup yang bertindak negatif, pelintas batas ilegal, hingga gangguan keamanan konkret lainnya dari wilayah seberang perbatasan).
- 5) Bentuk permukaan bumi di wilayah perbatasan, ada tidaknya permukaan bumi yang mirip di sekitar wilayah perbatasan, perbedaan permukaan bumi secara kontras, penggunaan permukaan bumi. Semua itu merupakan lingkup alami yang mendorong terjadinya interaksi positif atau negatif dalam lingkungan masyarakat perbatasan.

Hasil akhir yang lain dari penelitian adalah pembuatan peta. Dalam hal ini peta dan historiografi akan saling melengkapi. Patut diingat bahwa pembuatan peta geografi kesejarahan bukan merupakan lampiran atau suplemen dari narasi laporan penelitian, melainkan merupakan bentuk integrasi dari tafsiran-tafsiran yang telah dilakukan peneliti dalam uraian historiografinya.



## Bab 5

# PEMETAAN GEOGRAFI SEJARAH

### 5.1 Pengertian dan Batasan

#### 5.1.1 Pengertian Peta

Peta merupakan gambaran sebagian besar atau sebagian kecil permukaan bumi yang dipindahkan ke atas suatu bidang datar, dengan menggunakan suatu rumus matematis tertentu pada bidang proyeksi tertentu dan diperkecil dengan skala tertentu pula.

Peta merupakan alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan informasi spasial di permukaan bumi. Peta dapat menggambarkan objek yang dipetakan dalam sebaran ruang, Objek yang digambarkan dapat dilihat dalam sudut pandang ukuran, bentuk, dan lokasi.

Permukaan bumi merupakan bidang lengkung yang menyerupai bola maka tidak mungkin membuat gambaran permukaan bumi pada bidang datar (peta) tanpa mengalami distorsi atau perubahan bentuk. Karena penggambaran peta harus menggunakan skala, tidak semua kenampakan di permukaan

bumi dapat digambar sesuai dengan bentuk dan ukuran. Oleh karena itu, kenampakan objek di permukaan bumi biasanya digambarkan pada peta dalam bentuk simbol-simbol tertentu.

Peta dibagi menjadi:

**a. Peta Dasar Rupabumi/Peta Topografi**

Peta Dasar Rupabumi/Peta Topografi adalah peta yang bersifat umum, yang menyajikan semua unsur rupabumi/topografi seperti unsur alam (sungai, gunung, danau, laut) dan unsur buatan manusia (rumah, jalan, bendungan, jembatan). Peta dasar rupabumi diproduksi dan diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), sedangkan peta topografi diproduksi dan diterbitkan oleh Direktorat Topografi Angkatan Darat.

**b. Peta Tematik**

Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu untuk tujuan/keperluan tertentu, misalnya peta sebaran penduduk, peta kepadatan penduduk, peta tanah, peta tematik geografi sejarah.

### **5.1.2 Karakteristik Peta**

Karakteristik peta adalah unsur-unsur yang harus dicantumkan di dalam peta, baik dalam peta dasar rupabumi atau peta tematik. Semakin lengkap karakteristik peta dapat dipenuhi, akan memudahkan pembacaan peta dan peta tersebut akan semakin informatif.

Karakteristik peta meliputi:

**a. Sistem Koordinat**

Sistem koordinat adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu informasi, objek atau unsur geografis di permukaan bumi. Posisi tersebut dinyatakan dengan nilai lintang dan

bujur dalam satuan derajat (koordinat geografis), atau timur X dan utara Y dalam satuan meter (koordinat UTM). Lintang adalah garis horisontal dari timur ke barat dengan mengukur jarak dari utara atau selatan katulistiwa (ekuator), sedangkan bujur adalah garis vertikal dari utara ke selatan dan berpotongan pada kutub geografi (bumi) dengan mengukur jarak dalam satuan derajat (busur) ke timur dari meredian nol (bujur nol) yang melewati Greenwich, Inggris. Peta rupabumi Bakosurtanal menggunakan koordinat geografis dan koordinat UTM. Karena pemetaan sejarah dipersiapkan juga untuk disusun dalam sistem informasi geografis, dalam pembuatan peta tematik geografi sejarah sebaiknya juga menggunakan koordinat geografis dan UTM.

b. Proyeksi

Proyeksi adalah transformasi dari permukaan bumi yang berbentuk bola (bidang lengkung) ke suatu bidang datar atau peta dengan menggunakan formula matematis. Proyeksi yang digunakan di dalam peta rupabumi adalah Transverse Mercator. Akibat dari penggunaan proyeksi dalam pemetaan adalah terjadinya distorsi pada sudut, jarak, arah, dan luas. Dalam pembuatan peta tematik, biasanya proyeksi yang digunakan tidak perlu dicantumkan ke dalam peta karena secara otomatis proyeksi peta tematik tersebut mengikuti proyeksi peta dasar yang digunakan.

c. Skala

Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Oleh karena tidak semua informasi di permukaan bumi dapat di gambarkan dalam peta, perlu diadakan generalisasi, reduksi, dan

penonjolan sesuai dengan tema peta. Dalam pembuatan peta tematik, skala yang digunakan dapat pula bergantung pada panjang/lebar kertas yang akan digunakan.



























d. Orientasi

Orientasi adalah informasi arah terhadap utara. Pada peta-peta tematik, arah utara yang digunakan adalah arah utara sebenarnya dan untuk memudahkan pembacaan peta, arah utara pada peta tematik adalah ke arah atas muka peta tersebut.

e. Simbol

Simbol adalah representasi suatu objek di permukaan bumi yang digambar di atas peta. Simbol dibagi menjadi tiga macam:

1) Simbol titik, yaitu simbol yang digunakan untuk menggambarkan unsur kenampakan di permukaan bumi yang tidak terlalu luas, misalnya titik tinggi suatu tempat, bangunan kantor, sekolah, rumah sakit, sumur bor, dan gunung. Contoh simbol garis pada peta RBI adalah sebagai berikut.

	-	Bangunan			
		Mesjid, Gereja			
		Pura, Vihara			
		Kuburan :			
	+	Islam, Kristen			
	△	Hindu, Cina			
		Sekolah			
		Rumah Sakit / Puskesmas			
		Pasar			
		Polisi			
		Pelayanan Pos, Pelayanan Telepon			
					Kantor Pemerintah :
					Gubernur, Walikota
					Bupati, Camat
					Lurah, Desa
					TITIK KONTROL
					326 Titik Tinggi
					△P △S Titik Triangulasi : Primer, Sekunder
					△T Tersier
					*  Titik Dopler, Titik GPS
					T.T.G. Titik Tinggi Geodesi
					Titik Astronomi, Titik Gaya Berat

- 2) Simbol garis, yaitu simbol yang digunakan untuk menggambarkan unsur kenampakan di permukaan bumi yang berbentuk memanjang atau bentuk linier, misalnya jalan raya, jalan kereta api, sungai, garis kontur, dan batas administrasi, dll. Contoh simbol garis pada peta RBI adalah sebagai berikut.

	<b>Jalan :</b> <b>Layang</b>
	<b>Arteri satu, dua jalur atau lebih</b>
	<b>Kolektor dan tonggak Km.</b>
	<b>Lokal</b>
	<b>Lain</b>
	<b>Setapak</b>
<b>Jalan Kereta Api :</b>	
	<b>Rangkap</b>
	<b>Tunggal</b>
	<b>Jalan Lori</b>
	<b>Talang, Terowongan</b>
	<b>Stasiun, Perhentian Kereta Api,</b>
	<b>Terminal, Perhentian Bis</b>
	<b>Lapangan Terbang</b>
	<b>Lapangan Terbang Perintis</b>

Salah satu tema yang menggunakan simbol garis adalah batas administrasi. Batas administrasi adalah garis yang membatasi dua wilayah yang berdampingan dari suatu wilayah negara, provinsi kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/dukuh. Untuk pembacaan maupun

penggambaran peta, perlu diperhatikan bahwa apabila ada dua batas administrasi berimpitan, batas administrasi yang tingkatannya lebih rendah tidak perlu digambarkan.

Batas-batas administrasi tersebut adalah:

a. Batas Negara

Garis yang membatasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga. Batas tersebut digambarkan dalam bentuk garis putus-putus yang berulang dengan arsir di atasnya, warna hitam sepanjang daerah yang berbatasan.



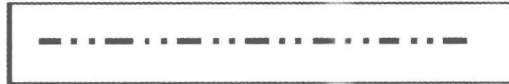
b. Batas Provinsi

Garis yang membatasi dua provinsi yang berdampingan. Garis batas tersebut digambarkan dengan garis dan satu titik berulang dengan warna hitam sepanjang daerah yang berbatasan.



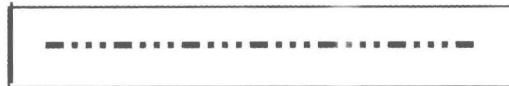
c. Batas Kabupaten/Kota

Garis yang membatasi dua kabupaten atau kota yang berdampingan. Garis batas tersebut digambarkan dengan garis dan dua titik berulang dengan warna hitam sepanjang daerah yang berbatasan.



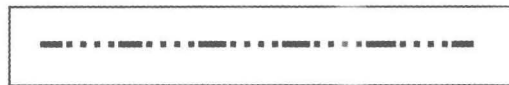
d. Batas Kecamatan

Garis yang membatasi dua kecamatan yang berdampingan. Garis batas tersebut digambarkan dengan garis dan tiga titik berulang dengan warna hitam sepanjang daerah yang berbatasan.











e. Batas Desa

Garis yang membatasi dua desa yang berdampingan. Garis batas tersebut digambarkan dengan garis dan empat titik berulang dengan warna hitam sepanjang daerah yang berbatasan.



- 3) Simbol area, yaitu simbol yang digunakan untuk menggambarkan unsur kenampakan homogen di permukaan bumi yang berbentuk area, misalnya sawah, hutan, semak belukar, tegal, dan tanah kosong. Contoh simbol area pada peta RBI adalah sebagai berikut:

TUMBUH-TUMBUHAN

	Sawah Irigasi
	Sawah Tadah Hujan
	Kebun / Perkebunan
	Hutan
	Semak Belukar
	Tegalan / Ladang
	Rumput / Tanah Kosong
	Hutan Rawa

f. Legenda

Legenda atau keterangan pada suatu peta berisi informasi dari simbol-simbol yang digunakan di dalam peta tersebut. Setiap peta tematik harus mencantumkan legenda. Semua simbol yang digunakan dalam peta harus dijelaskan pada legenda. Semakin lengkap isi legenda, peta akan semakin informatif dan semakin mudah bagi pengguna untuk memahami peta.

g. Sumber Data

Semua data yang digunakan dalam pembuatan peta tematik perlu dicantumkan ke dalam peta, seperti peta dasar rupabumi



atau peta topografi, dan foto udara. Sumber data yang dicantumkan dalam peta tidak hanya mengenai sumber peta dasarnya, tetapi dapat pula dicantumkan mengenai sumber data tematik yang digunakan atau data sekunder lainnya.

## **5.2 Pembuatan Peta Kerja**

Peta kerja adalah peta yang digunakan sebagai dasar untuk menempatkan data atau informasi tematik tertentu. Pada umumnya peta dasar berisi beberapa unsur rupabumi yang diperlukan. Peta dasar suatu wilayah kabupaten/kota berisi informasi tentang kecamatan dan desa yang ada di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk membuat suatu peta kerja tersebut, langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

- 1) Menentukan wilayah yang akan dipetakan (provinsi, kabupaten/kota atau kecamatan).

Informasi tentang wilayah yang akan dipetakan sangat penting karena hal ini akan berhubungan dengan tingkat rincian suatu peta. Peta dengan wilayah kecamatan akan lebih rinci informasinya dibandingkan dengan peta dengan wilayah Provinsi pada ukuran kertas yang sama. Namun demikian, tingkat rincian peta kerja juga bergantung pada skala peta dasar yang digunakan sebagai sumber data.

Prioritas utama peta dasar yang digunakan adalah peta rupabumi. Apabila belum ada atau tidak ada peta rupabumi,

dapat digunakan peta topografi dan apabila peta topografi juga belum ada, dapat digunakan peta-peta lainnya yang ada. Pada umumnya satu kabupaten, kota, atau kecamatan terpisah-pisah dalam dua atau lebih lembar peta rupabumi/topografi. Peta rupabumi yang diproduksi oleh Bakosurtanal telah didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan pengguna peta untuk merangkai/membuat mosaik peta.

Untuk membuat peta kerja yang mencakup satu kabupaten, kota atau kecamatan, lembar-lembar peta rupabumi tersebut perlu dimosaik (dirangkai) terlebih dahulu. Setelah itu baru digambar kembali atau didigitasi dengan komputer. Penggambaran kembali perlu disesuaikan dengan skala peta dan lebar kertas transparan yang tersedia (kalkir/stable base), sedangkan proses digitasi tidak perlu menyesuaikan dengan lebar kertas.

## 2) Skala peta

Peta yang dibuat dengan skala besar akan mempunyai informasi yang lebih rinci dibandingkan dengan peta yang memiliki skala kecil. Skala peta kerja pada peta tematik tertentu tergantung dari ketersediaan peta rupabumi/topografi yang ada. Peta kerja dapat pula dibuat dari hasil pengecilan skala peta dasar.

Pada prinsipnya, pemetaan georafi sejarah dapat menggunakan beberapa skala peta, terutama untuk memudahkan dalam penggambaran dan pembacaan peta. Namun hal ini tergantung pada tema yang akan

digambarkan. Untuk tema yang menunjukkan lokasi-lokasi pada wilayah yang relatif sempit, dapat digunakan peta skala sedang sampai besar, sedangkan untuk tema yang menunjukkan adanya hubungan antara satu wilayah dan wilayah lain, peta yang digunakan adalah peta skala kecil.

Untuk memudahkan penggambaran ulang, sebaiknya skala yang digunakan sama dengan peta dasar yang tersedia walaupun kadang-kadang informasi yang ada pada peta tersebut masih kurang detil.

3) Unsur-unsur peta rupabumi dalam peta dasar

Tema suatu peta sangat penting dalam menentukan unsur-unsur kenampakan permukaan bumi pada peta rupabumi/topografi yang akan digambarkan di dalam peta dasar. Pada umumnya, unsur-unsur peta rupabumi yang perlu dimasukkan ke dalam peta dasar adalah sungai, jalan, garis pantai, permukiman, dan batas administrasi, tergantung pada skala peta yang digunakan.

Dalam pembuatan peta dengan skala besar, selain unsur-unsur tersebut di atas, perlu dimasukkan pula unsur-unsur yang penting lainnya, seperti gedung pemerintahan, gedung peribadatan, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi, kantor pos, kantor telepon, pasar atau bangunan penting lainnya. Unsur-unsur tersebut sangat penting karena dapat digunakan sebagai titik kontrol untuk mengidentifikasi lokasi sejarah.

4) Penggambaran peta kerja pada kertas transparan

Apabila peta dasar yang akan digunakan dalam pengeplotan geografi sejarah harus digambar kembali, perlu disiapkan kertas transparan yang stabil (tidak mudah mengembang).

Namun apabila sudah tersedia perangkat lunak dan perangkat keras kartografi atau sistem informasi geografis, peta dasar tersebut dapat langsung didigitasi, tanpa harus digambar ulang.

Untuk membuat peta kerja berdasarkan batas administrasi, setelah batas-batas wilayah kabupaten/kota, dan kecamatan dapat diidentifikasi pada peta rupabumi. Selanjutnya peta-peta tersebut dimosaik (dirangkai) sesuai dengan lembar peta yang bersambungan.

Apabila peta dasar telah dimosaik atau dirangkai sesuai dengan batas wilayah (kecamatan) yang ada, perlu dilakukan penentuan lokasi pada kertas transparan (tata letak) agar dapat digambar pada tengah-tengah kertas transparan.

Seperti telah dijelaskan, penggambaran ulang peta dasar pada kertas transparan dilakukan dengan men-‘trace’ ulang unsur-unsur jalan, sungai, danau, garis pantai, permukiman, dan batas administrasi. Selain itu, perlu menggambar garis grid peta dan memberi koordinat lintang dan bujur.

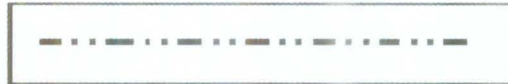
Karena pedoman pemetaan ini disusun untuk membuat peta tematik geografi sejarah, perlu diperhatikan batas-batas wilayah yang akan digambar. Penggambaran batas wilayah administrasi tersebut menggunakan spesifikasi seperti yang telah dijelaskan pada bab simbol garis.

### **5.3 Peta Tematik Geografi Sejarah**

Berdasarkan kajian geografi sejarah seperti pada bab terdahulu, peta tematik geografi sejarah yang dapat dipetakan meliputi hal-hal sebagai berikut.

c. Batas Kabupaten/Kota

Garis yang membatasi dua kabupaten atau kota yang berdampingan. Garis batas tersebut digambarkan dengan garis dan dua titik berulang dengan warna hitam sepanjang daerah yang berbatasan.



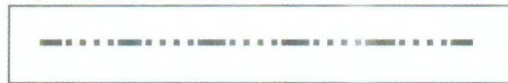
d. Batas Kecamatan

Garis yang membatasi dua kecamatan yang berdampingan. Garis batas tersebut digambarkan dengan garis dan tiga titik berulang dengan warna hitam sepanjang daerah yang berbatasan.



e. Batas Desa

Garis yang membatasi dua desa yang berdampingan. Garis batas tersebut digambarkan dengan garis dan empat titik berulang dengan warna hitam sepanjang daerah yang berbatasan.



- 3) Simbol area, yaitu simbol yang digunakan untuk menggambarkan unsur kenampakan homogen di permukaan bumi yang berbentuk area, misalnya sawah, hutan, semak belukar, tegal, dan tanah kosong. Contoh simbol area pada peta RBI adalah sebagai berikut:

TUMBUH-TUMBUHAN

	Sawah Irigasi
	Sawah Tadah Hujan
	Kebun / Perkebunan
	Hutan
	Semak Belukar
	Tegalan / Ladang
	Rumput / Tanah Kosong
	Hutan Rawa

f. Legenda

Legenda atau keterangan pada suatu peta berisi informasi dari simbol-simbol yang digunakan di dalam peta tersebut. Setiap peta tematik harus mencantumkan legenda. Semua simbol yang digunakan dalam peta harus dijelaskan pada legenda. Semakin lengkap isi legenda, peta akan semakin informatif dan semakin mudah bagi pengguna untuk memahami peta.

g. Sumber Data

Semua data yang digunakan dalam pembuatan peta tematik perlu dicantumkan ke dalam peta, seperti peta dasar rupabumi

atau peta topografi, dan foto udara. Sumber data yang dicantumkan dalam peta tidak hanya mengenai sumber peta dasarnya, tetapi dapat pula dicantumkan mengenai sumber data tematik yang digunakan atau data sekunder lainnya.

## **5.2 Pembuatan Peta Kerja**

Peta kerja adalah peta yang digunakan sebagai dasar untuk menempatkan data atau informasi tematik tertentu. Pada umumnya peta dasar berisi beberapa unsur rupabumi yang diperlukan. Peta dasar suatu wilayah kabupaten/kota berisi informasi tentang kecamatan dan desa yang ada di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk membuat suatu peta kerja tersebut, langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

- 1) Menentukan wilayah yang akan dipetakan (provinsi, kabupaten/kota atau kecamatan).

Informasi tentang wilayah yang akan dipetakan sangat penting karena hal ini akan berhubungan dengan tingkat rincian suatu peta. Peta dengan wilayah kecamatan akan lebih rinci informasinya dibandingkan dengan peta dengan wilayah Provinsi pada ukuran kertas yang sama. Namun demikian, tingkat rincian peta kerja juga bergantung pada skala peta dasar yang digunakan sebagai sumber data.

Prioritas utama peta dasar yang digunakan adalah peta rupabumi. Apabila belum ada atau tidak ada peta rupabumi,

dapat digunakan peta topografi dan apabila peta topografi juga belum ada, dapat digunakan peta-peta lainnya yang ada. Pada umumnya satu kabupaten, kota, atau kecamatan terpisah-pisah dalam dua atau lebih lembar peta rupabumi/topografi. Peta rupabumi yang diproduksi oleh Bakosurtanal telah didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan pengguna peta untuk merangkai/membuat mosaik peta.

Untuk membuat peta kerja yang mencakup satu kabupaten, kota atau kecamatan, lembar-lembar peta rupabumi tersebut perlu dimosaik (dirangkai) terlebih dahulu. Setelah itu baru digambar kembali atau didigitasi dengan komputer. Penggambaran kembali perlu disesuaikan dengan skala peta dan lebar kertas transparan yang tersedia (kalkir/stable base), sedangkan proses digitasi tidak perlu menyesuaikan dengan lebar kertas.

## 2) Skala peta

Peta yang dibuat dengan skala besar akan mempunyai informasi yang lebih rinci dibandingkan dengan peta yang memiliki skala kecil. Skala peta kerja pada peta tematik tertentu tergantung dari ketersediaan peta rupabumi/topografi yang ada. Peta kerja dapat pula dibuat dari hasil pengecilan skala peta dasar.

Pada prinsipnya, pemetaan georafi sejarah dapat menggunakan beberapa skala peta, terutama untuk memudahkan dalam penggambaran dan pembacaan peta. Namun hal ini tergantung pada tema yang akan



digambarkan. Untuk tema yang menunjukkan lokasi-lokasi pada wilayah yang relatif sempit, dapat digunakan peta skala sedang sampai besar, sedangkan untuk tema yang menunjukkan adanya hubungan antara satu wilayah dan wilayah lain, peta yang digunakan adalah peta skala kecil.

Untuk memudahkan penggambaran ulang, sebaiknya skala yang digunakan sama dengan peta dasar yang tersedia walaupun kadang-kadang informasi yang ada pada peta tersebut masih kurang detail.

3) Unsur-unsur peta rupabumi dalam peta dasar

Tema suatu peta sangat penting dalam menentukan unsur-unsur kenampakan permukaan bumi pada peta rupabumi/topografi yang akan digambarkan di dalam peta dasar. Pada umumnya, unsur-unsur peta rupabumi yang perlu dimasukkan ke dalam peta dasar adalah sungai, jalan, garis pantai, permukiman, dan batas administrasi, tergantung pada skala peta yang digunakan.

Dalam pembuatan peta dengan skala besar, selain unsur-unsur tersebut di atas, perlu dimasukkan pula unsur-unsur yang penting lainnya, seperti gedung pemerintahan, gedung peribadatan, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi, kantor pos, kantor telepon, pasar atau bangunan penting lainnya. Unsur-unsur tersebut sangat penting karena dapat digunakan sebagai titik kontrol untuk mengidentifikasi lokasi sejarah.

4) Penggambaran peta kerja pada kertas transparan

Apabila peta dasar yang akan digunakan dalam pengeplotan geografi sejarah harus digambar kembali, perlu disiapkan kertas transparan yang stabil (tidak mudah mengembang).

Namun apabila sudah tersedia perangkat lunak dan perangkat keras kartografi atau sistem informasi geografis, peta dasar tersebut dapat langsung didigitasi, tanpa harus digambar ulang.

Untuk membuat peta kerja berdasarkan batas administrasi, setelah batas-batas wilayah kabupaten/kota, dan kecamatan dapat diidentifikasi pada peta rupabumi. Selanjutnya peta-peta tersebut dimosaik (dirangkai) sesuai dengan lembar peta yang bersambungan.

Apabila peta dasar telah dimosaik atau dirangkai sesuai dengan batas wilayah (kecamatan) yang ada, perlu dilakukan penentuan lokasi pada kertas transparan (tata letak) agar dapat digambar pada tengah-tengah kertas transparan.

Seperti telah dijelaskan, penggambaran ulang peta dasar pada kertas transparan dilakukan dengan men-‘trace’ ulang unsur-unsur jalan, sungai, danau, garis pantai, permukiman, dan batas administrasi. Selain itu, perlu menggambar garis grid peta dan memberi koordinat lintang dan bujur.

Karena pedoman pemetaan ini disusun untuk membuat peta tematik geografi sejarah, perlu diperhatikan batas-batas wilayah yang akan digambar. Penggambaran batas wilayah administrasi tersebut menggunakan spesifikasi seperti yang telah dijelaskan pada bab simbol garis.

### **5.3 Peta Tematik Geografi Sejarah**

Berdasarkan kajian geografi sejarah seperti pada bab terdahulu, peta tematik geografi sejarah yang dapat dipetakan meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Lingkungan sejarah: lingkungan sosial dan lingkungan fisik.
- b. Peradaban sejarah, yaitu
  - (1) Masyarakat pemburu dan peramu
  - (2) Masyarakat peladang
  - (3) Masyarakat nelayan atau masyarakat maritim
  - (4) Masyarakat petani-sawah atau petani agraris
- c. Dinamika penataan wilayah, yaitu
  - (1) Pemekaran wilayah kekuasaan kerajaan
  - (2) Penggabungan wilayah suatu kerajaan ke dalam kerajaan yang lain
  - (3) Pemekaran wilayah administrasi pemerintahan

#### **5.4 Pembuatan Simbol Peta Tematik Geografi Sejarah**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, simbol adalah representasi suatu objek di permukaan bumi yang digambar di atas peta. Oleh karena itu, biasanya simbol dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mempresentasikan objek yang diwakili dan memudahkan pengguna peta untuk memahami isi peta.

Simbol geografi sejarah dan peninggalan sejarah yang dibuat dapat disesuaikan dengan simbol-simbol yang pernah dibuat dalam pemetaan peninggalan sejarah sebelumnya, dengan sedikit perubahan, sesuai dengan jenis peninggalan sejarah yang ada pada saat ini (lihat lampiran: spesifikasi simbol peninggalan sejarah). Simbol tersebut menggunakan bentuk dan warna yang bervariasi, tetapi didesain sedemikian rupa agar tidak menyulitkan pembuat peta peninggalan sejarah. Simbol tersebut dapat berupa

simbol piktorial yang mirip dengan bentuk aslinya atau simbol-simbol lainnya dengan menggunakan bentuk setengah lingkaran, lingkaran, segitiga, persegi, atau bentuk lainnya, yang dapat pula dibedakan berdasarkan warna yang tersedia. Setiap jenis peninggalan sejarah dapat dibuat dengan menggunakan simbol piktorial dengan kombinasi antara bentuk tertentu dengan warna tertentu sehingga dapat dibedakan antara satu jenis peninggalan sejarah dan jenis peninggalan sejarah lainnya.

Untuk keseragaman antara peta peninggalan sejarah satu wilayah dan wilayah yang lain (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan) maka bentuk dan warna simbol tipe peninggalan sejarah harus dibuat sama agar tidak menyulitkan pengguna peta peninggalan sejarah.

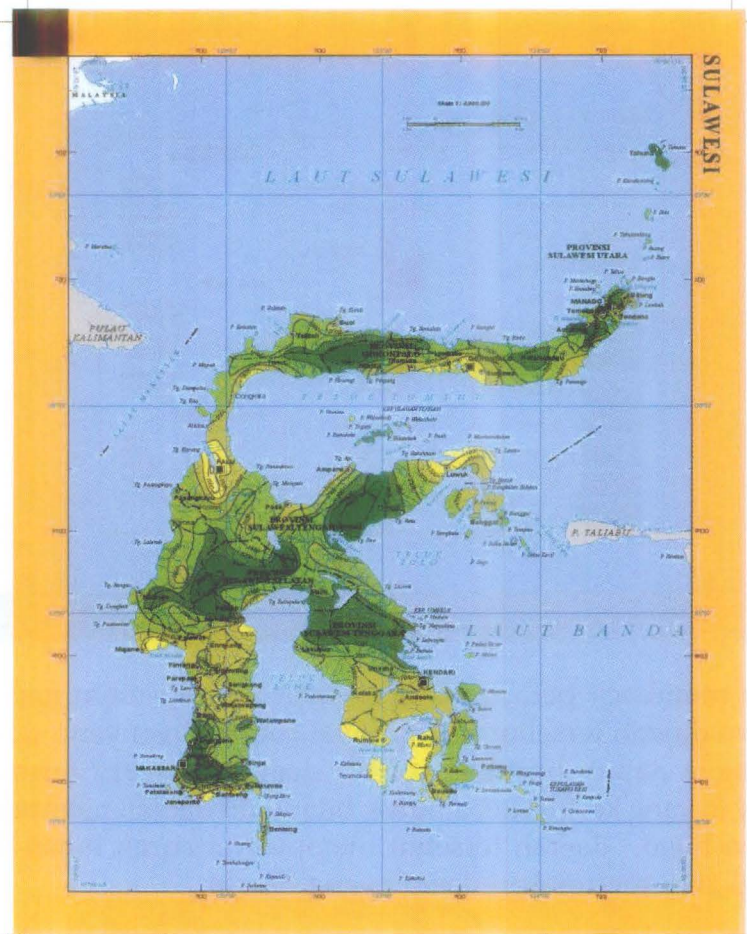
## **5.5 Pemetaan Lingkungan Sejarah**

### **5.5.1 Lingkungan Fisik**

#### *a. Peta Perubahan Iklim*

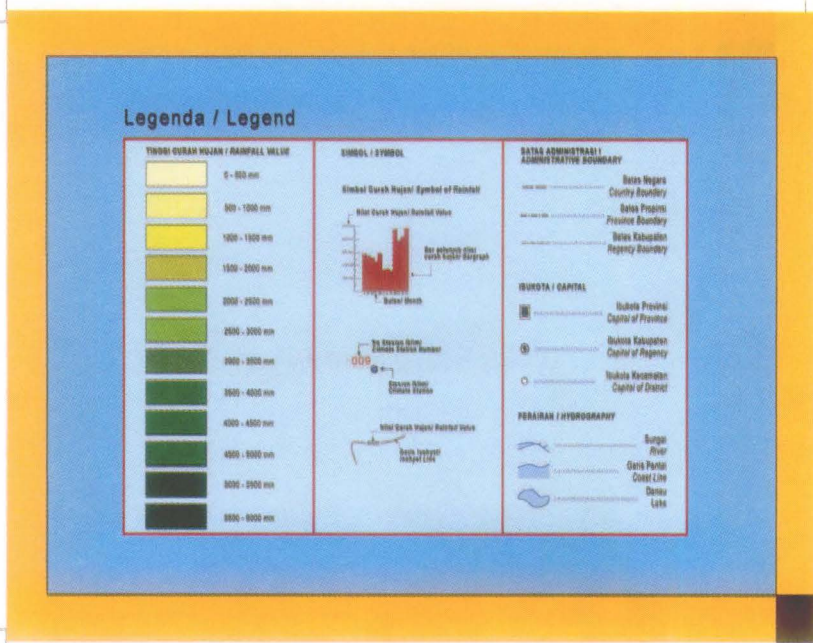
Peta perubahan iklim merupakan peta yang menggambarkan iklim dari suatu wilayah, seperti peta curah hujan.

Peta curah hujan digambarkan dengan simbol garis. Garis tersebut disebut isohyet, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai curah hujan sama. Klasifikasi curah hujan dibuat dengan interval 500 mm. Kemudian, interval tersebut diberi warna seperti pada legenda di bawah ini. Interval tersebut ditentukan berdasarkan skala peta yang digunakan.



Sumber: Atlas Curah Hujan, Bakosurtanal, 2001

Garis isohyet tersebut dibuat dari hasil analisis data curah hujan rata-rata selama lebih dari 20 tahun. Ketelitian/kedetilan garis tersebut tergantung pada tingkat kerapatan stasiun curah hujan dan skala peta yang digunakan.

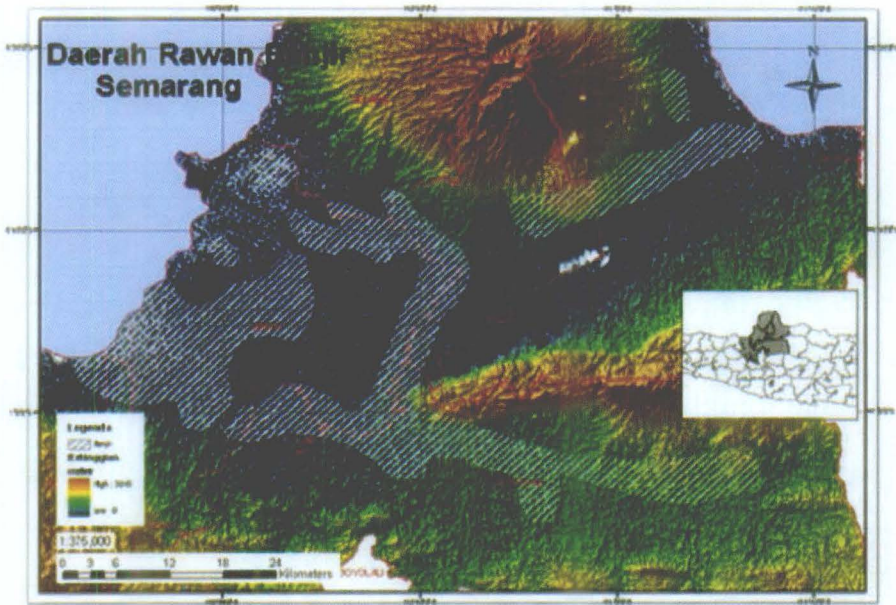


Cara membaca peta: area berwarna kuning menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai curah hujan yang rendah sehingga dapat diartikan bahwa daerah tersebut termasuk wilayah yang kering. Sebaliknya, bila suatu daerah mempunyai warna hijau, daerah tersebut mempunyai curah hujan yang tinggi atau merupakan daerah yang basah.

*b. Bencana Alam*

Peta bencana alam menggambarkan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi atau rawan terjadinya bencana alam, seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Wilayah rawan bencana tersebut digambarkan dengan simbol area. Namun apabila peta tersebut mencakup berbagai macam bencana, simbol ditambah dengan perbedaan warna.

Setiap warna merupakan simbol satu jenis bencana. Di bawah ini adalah contoh peta bencana banjir di Semarang. Perbedaan warna merupakan perbedaan ketinggian tempat.

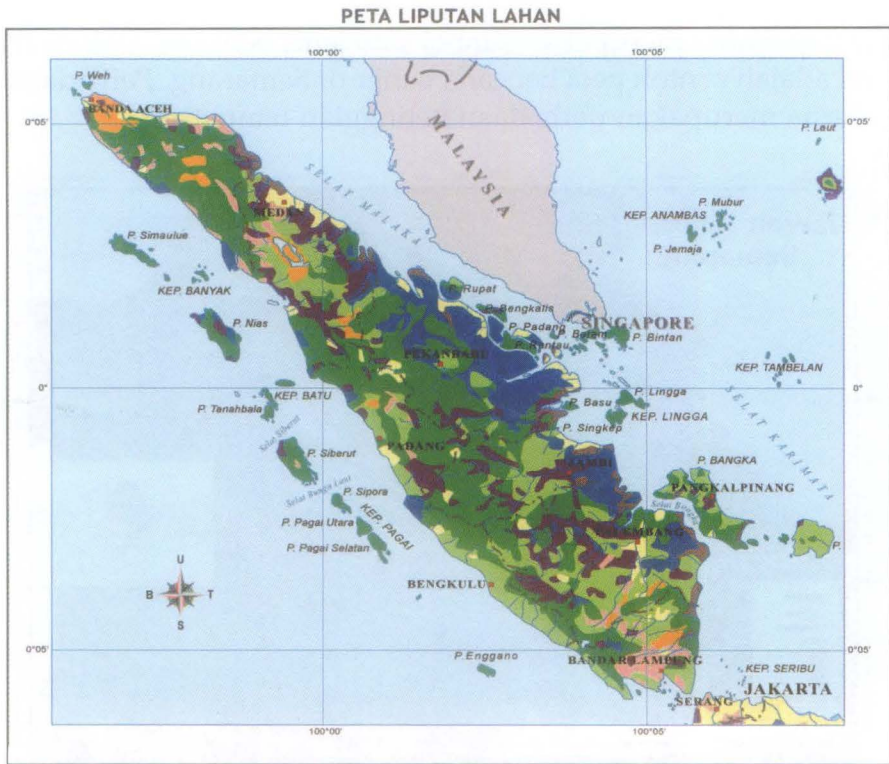


Sumber: Peta Rawan Bencana (Bakosurtanal, ESDM, dan BMG)

*c. Perubahan Permukiman:*

Data perubahan permukiman dapat diperoleh dari peta liputan lahan Bakosurtanal. Bakosurtanal telah membuat peta liputan lahan dengan tingkat kedetilan yang bervariasi, misalnya dengan skala 1:250.000 dan 1:1.000.000. Di bawah ini adalah salah satu contoh peta liputan lahan dengan skala 1: 13.500.000.

Salah satu manfaat peta tersebut adalah dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta-peta tematik lainnya seperti neraca perubahan lahan, neraca air, neraca mineral, dan neraca hutan.



Sumber: Atlas Sumber Daya Indonesia, Bakosurtanal, 2001.

**Legenda:**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Hutan Lebat                    |
|  | Hutan Sejenis                  |
|  | Hutan Rawa Gambut              |
|  | Hutan Bakau                    |
|  | Alang-alang                    |
|  | Sawah dan Pemukiman            |
|  | Perkebunan                     |
|  | Pertanian Lahan Kering/Tegalan |

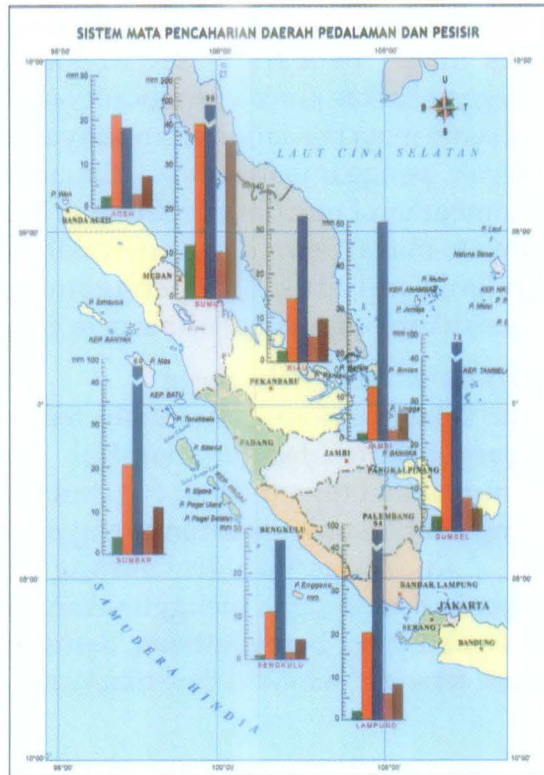


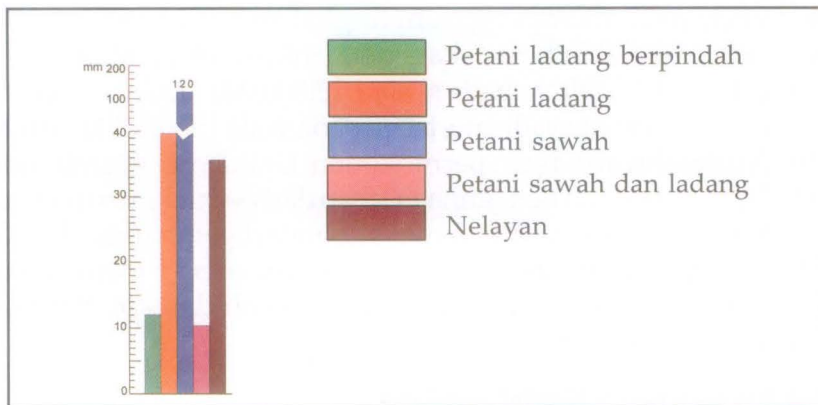
Skala peta akan mempengaruhi tingkat kedetilan informasi di dalamnya. Semakin besar skala peta, informasi yang disajikan semakin detil. Misalnya pada skala 1:13.500.000 klasifikasi sawah dan permukiman menjadi satu, tetapi pada skala 1:250.000 klasifikasi sawah dipisahkan dengan permukiman. Untuk menggambarkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari permukiman menjadi non-permukiman atau sebaliknya, biasanya digambarkan dengan simbol warna dan notasi huruf, misalnya huruf S – P menyatakan bahwa lahan tersebut awalnya adalah sawah dan kini berubah menjadi permukiman.

### 5.5.2 Lingkungan Sosial Budaya

a. *Sistem Mata Pencarian Daerah Pedalaman dan Pesisir*

Digambarkan dengan simbol: Bargraph





Perbedaan warna pada bar/batang merupakan perbedaan jenis mata pencarian, sedangkan tingginya bar/batang menggambarkan jumlah penduduk yang bermata pencarian sama. Bila suatu mata pencarian mempunyai jumlah penduduk sangat banyak, penggambaran dapat dibuat perbandingan. Misalnya, digambarkan 1 mm untuk 100 orang. Namun bila penduduknya banyak, maka 1 mm dapat mewakili 10.000 orang. Klasifikasi jumlah penduduk dan penggambaran lebar bar/batang disesuaikan pula dengan skala peta yang akan digunakan.

#### *b. Pelayaran dan Perdagangan*

Jalur Pelayaran kapal dari suatu tempat ketempat lain dapat digambarkan dengan simbol panah. Tanda panah menunjukkan tujuan kapal tersebut, sedangkan warna panah menggambarkan jenis barang yang dibawa oleh kapal tersebut.

Kuantitas/jumlah barang yang dibawa dapat digambarkan dengan menggunakan panah tetapi mempunyai ketebalan yang berbeda-beda. Semakin tebal berarti bawaan kapal tersebut semakin besar/banyak.



Peta di atas adalah contoh peta jalur pelayaran dan perdagangan di Laut Sawu, dengan berbagai barang komoditi perdagangan.

Kuantitas/jumlah barang yang dibawa digambarkan dengan menggunakan panah tetapi mempunyai ketebalan yang berbeda-beda. Semakin tebal berarti bawaan kapal tersebut semakin besar/banyak.

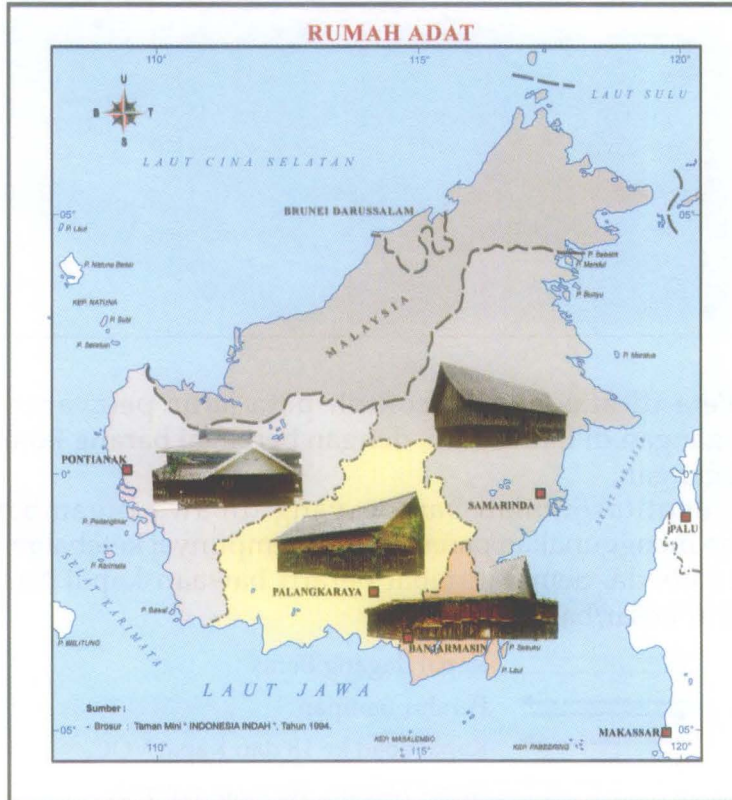
-  Kapal dagang Beras
-  Perahu Sampan
-  Kapal abad ke 18 dan Kapal VOC.
-  Kapal Dagang Rempah-rempah
-  Kapal Dagang Produk Asam
-  Perahu Layar
-  Pelayaran Kupang-Rote

## 5.6 Pemetaan Peradaban Sejarah

### 5.6.1. Masyarakat Pemburu dan Peramu

1) Jenis dan bentuk rumah

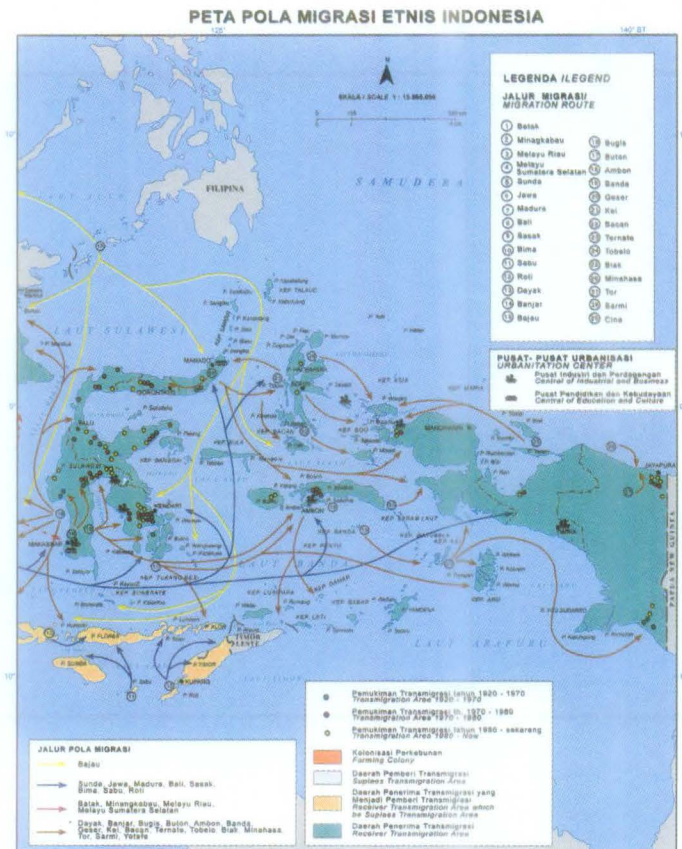
Simbol piktorial yang digunakan sebagai berikut



Pada skala peta yang lebih besar, dapat digambarkan informasi yang lebih detail. Jenis dan bentuk rumah dapat dibuat klasifikasi berdasarkan jenis dan bentuk rumah pada daerah masing-masing.

- 2) Cara bercocok tanam: mencangkul, membajak, dan lain-lain  
 Simbol yang digunakan adalah simbol piktorial. Alat-alat digambarkan sesuai dengan bentuk aslinya kemudian diletakkan pada daerah yang menggunakan jenis alat tersebut. Penggambaran dilakukan seperti pada contoh peta jenis dan bentuk rumah.

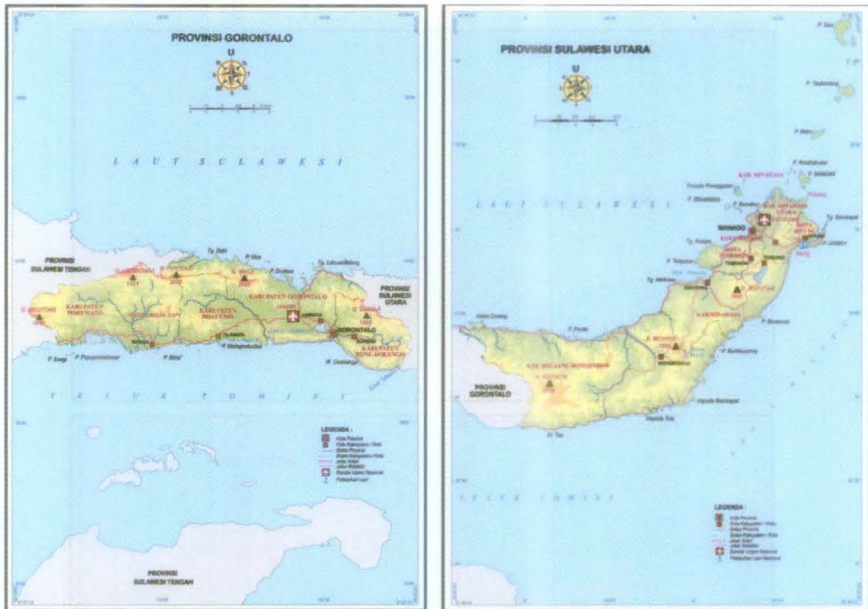
### 5.6.2 Masyarakat Maritim



## 5.7 Pemetaan Dinamika Penataan Wilayah

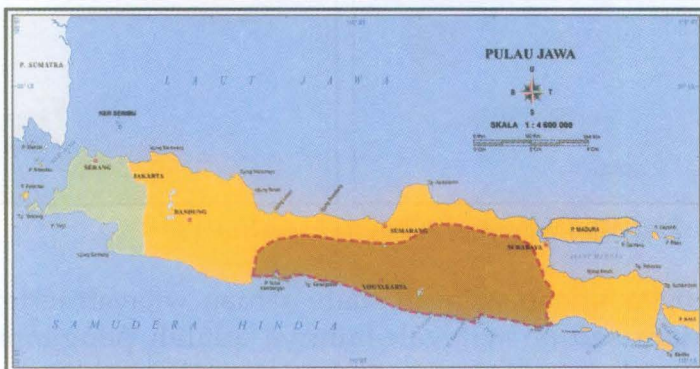
- a. Pemekaran wilayah administrasi pemerintahan: dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pemecahan suatu wilayah administrasi yang menjadi dua atau lebih satuan administrasi dengan batas-batas wilayah baru, keluasan wilayah, dan relief permukaan tanah.





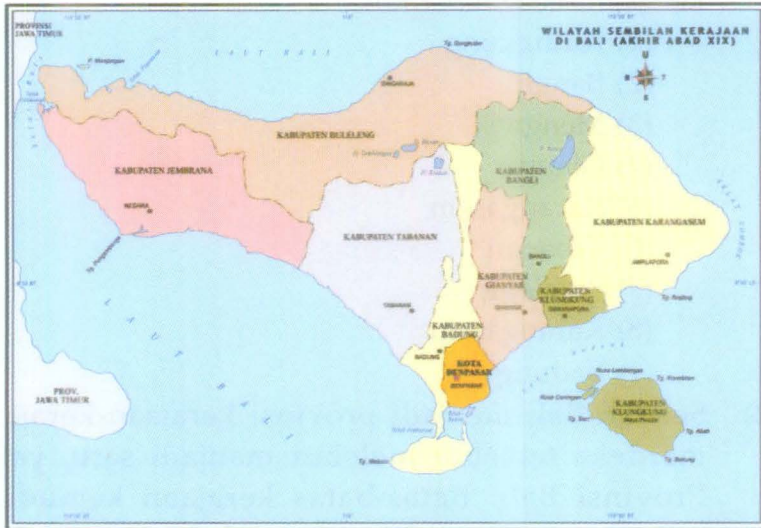
Contoh: Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Utara/Gorontalo

- b. Penggabungan wilayah suatu satuan wilayah tertentu ke dalam satuan wilayah lainnya adalah penggabungan wilayah yang semula tidak termasuk ke dalam satuan wilayah tertentu kemudian dimasukkan dalam satuan wilayah tersebut. Contohnya, penggabungan wilayah-wilayah yang semula bagian kerajaan Mataram Islam kemudian menjadi wilayah yang diampu oleh VOC-Belanda. Dalam hal ini harus digambarkan perkembangan wilayah Batavia (wilayah awal kekuasaan Belanda di Jawa) yang kemudian melebar menguasai pula Parahyangan, Pantura Jawa bagian tengah dan timur, Madura, daerah timur Jawa, dan akhirnya hanya menyisakan dua wilayah kerajaan Jawa yakni Jogjakarta dan Surakarta.





- c. Peleburan wilayah-wilayah satuan administrasi tertentu menjadi satu wilayah administrasi pemerintahan yang lebih luas.



- 1) Contoh: Peta kerajaan-kerajaan di Bali sebelum pertengahan abad ke-19. Di dalamnya terdapat kerajaan sebagai berikut.
  - (1) Klungkung
  - (2) Bangli
  - (3) Mengwi
  - (4) Gianyar
  - (5) Karangasem
  - (6) Tabanan
  - (7) Buleleng
  - (8) Karangasem
  - (9) Badung
- 2) Setelah Bali menjadi provinsi kerajaan-kerajaan merdeka tersebut melebur menjadi satu, yaitu Provinsi Bali. Batas-batas kerajaan kemudian menjelma menjadi batas-batas kabupaten dalam provinsi Bali. Keluasan wilayah kerajaan-kerajaan tersebut menjelma menjadi keluasan wilayah kabupaten dengan nama yang sama dengan nama kerajaannya dahulu. Hal yang dikecualikan adalah Kerajaan Mengwi yang wilayahnya dimasukkan sebagian menjadi wilayah Tabanan dan Gianyar sekarang.

## **5.8 Pembuatan Sketsa Geografi Sejarah**

Peta geografi sejarah dapat dibuat dari peta dasar rupabumi. Walaupun, ada sejarawan yang tidak memahami peta, seperti peta rupabumi atau peta tematik. Namun, untuk menampung

hasil-hasil kajian geografi sejarah ke dalam bentuk peta, dimungkinkan bagi seorang sejarawan untuk menuangkan hasil kajiannya ke dalam bentuk peta sketsa. Sketsa tersebut dapat dituangkan atau dipindahkan ke dalam peta tematik. Oleh karena itu, dalam pembuatan peta sketsa, perlu dimasukkan simbol bentuk permukaan bumi tertentu, agar dapat digunakan sebagai titik kontrol.

## 5.9 Kelengkapan dan Finishing Peta Geografi Sejarah

Pemetaan peninggalan sejarah tidak diutamakan hanya untuk plotting lokasi peninggalan sejarah di atas peta dasar. Namun, kelengkapan peta peninggalan sejarah juga harus diperhatikan. Peta peninggalan sejarah tersebut harus dilengkapi dengan judul, skala, legenda/keterangan, sumber data, riwayat peta, dan lain-lain. Sesuai dengan desain tata letak (layout) peta yang telah ditentukan.

### 1) Penempatan legenda/symbol

Langkah-langkah dalam pembuatan legenda/symbol adalah sebagai berikut.

- a. Legenda yang berisi simbol dan keterangannya diletakkan di sebelah kiri peta, di bawah judul, orientasi, dan skala peta.
- b. Simbol-simbol peta dasar rupabumi/topografi digambar di bagian atas, kemudian di bawahnya digambar simbol-simbol tipe peninggalan sejarah
- c. Legenda yang dibuat pada peta disesuaikan dengan kepentingan. Sebaiknya tidak semua simbol peninggalan

sejarah dicantumkan dalam legenda, tetapi hanya simbol yang tercantum dalam peta saja yang dibuat legendanya

d. Karena bagian tepi peta akan diberi lis, sebaiknya legenda digambarkan maksimal 2 cm dari bagian tepi kiri lembar peta

## 2) Penempatan data peninggalan sejarah

Untuk mengetahui jenis dan jumlah peninggalan sejarah yang ada, data tersebut perlu ditempatkan pada bagian belakang lembar peta. Data tersebut adalah penutup (*cover*) peta.

## 3) Penutup (*cover*) peta

Agar peta tidak cepat lusuh, kotor, atau sobek, peta tersebut perlu dibuatkan penutup atau ditutup dengan plastik dengan persyaratan sebagai berikut.

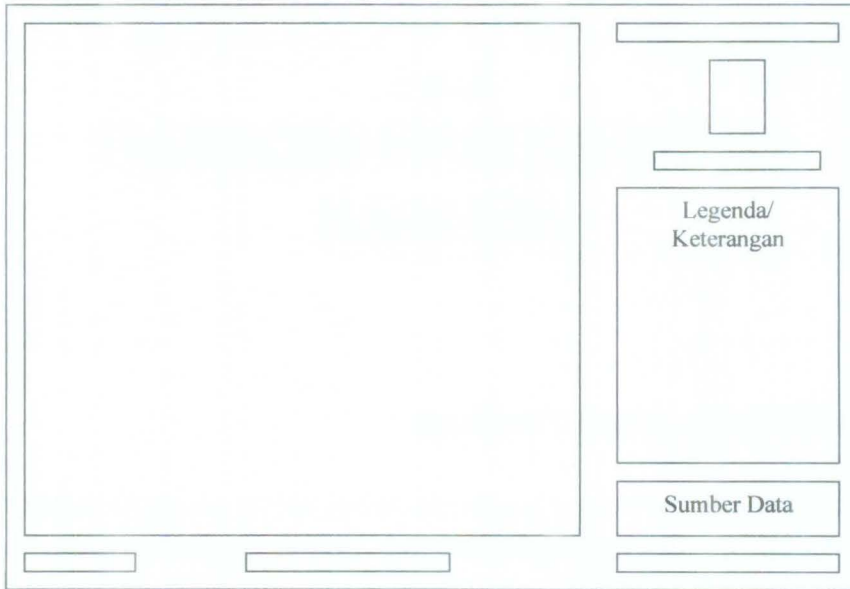
- a. Plastik transparan dengan ketebalan 0,3 mm.
- b. Dipasang rata dengan bidang muka peta, dimulai dari satu arah untuk menghindari pemasangan yang menggelembung.
- c. Sebaiknya digunakan alat bantu untuk meratakan plastik.
- d. Bagian tepi penutup diperkuat dengan paku payung agar plastik terpasang kuat.

## 4) Lis peta

Agar tampak lebih rapi, sebaiknya keempat sisi peta diberi lis dengan cara sebagai berikut.

- a. Lis dibuat dari lakban dengan ukuran 5 cm, warna hitam, dan dipasang hingga menempel kuat pada peta.
- b. Lis dipasang 2 cm dari sisi tepi peta.
- c. Pada bagian sudut pertemuan, lis dipotong 45 derajat.

## 5.10 Desain Tata Letak (Layout) Peta Sejarah



### Keterangan:

- 1) Judul Peta
- 2) Orientasi Peta
- 3) Indeks Peta
- 4) Skala Numerik
- 5) Legenda/Keterangan
- 6) Sumber Data/Riwayat Peta
- 7) Pembuat Peta
- 8) Skala Grafis
- 9) Tahun Produksi Peta

## Bab 6

# HISTORIOGRAFI GEOGRAFI SEJARAH

### 6.1 Kerangka Umum Penulisan

Sebagaimana penulisan sejarah lainnya, kajian geografi sejarah pun diakhiri dengan suatu bentuk penulisan (historiografi). Historiografi adalah tahapan terakhir dalam suatu penelitian kesejarahan. Karena merupakan tahapan yang penting, historiografi harus digarap sebaik-baiknya oleh para peneliti sejarah. Secara garis besar historiografi sejarah terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi yang terdiri dari dua hal penting, yaitu analisis dan interpretasi, serta bagian akhir penulisan yang berisikan hasil penelitian sejarah.

#### 6.1.1 Bagian Pendahuluan

Adalah segmen tulisan yang biasa disebut pula dengan pengantar dan selalu berada pada bagian awal setiap penulisan suatu karya penelitian apapun. Bagian ini berisi berbagai sub-bab yang antara lain latar belakang kajian, permasalahan (hal-hal yang harus

diungkap dalam penelitian), tujuan dan manfaat penelitian, dasar teori, batasan dan konsep, data dan sumber data, tinjauan pustaka yang berupa perbincangan ringkas perihal yang pernah dilakukan terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan

### **6.1.2 Bagian Isi**

Bagian ini merupakan inti tulisan. Secara garis besar memuat dua elemen penulisan, yaitu bab analisis dan bab tentang hasil kajian yang dapat berupa interpretasi baru. Oleh karena itu, bagian isi tersebut tidak hanya terdiri dari satu bab, tetapi terdiri dari minimal dua bab atau bahkan tiga bab. Dalam bagian analisis dikemukakan alasan dan tinjauan terhadap permasalahan geografi sejarah, sedangkan bab lainnya adalah tentang upaya pemecahan permasalahan hingga kesimpulan yang diambil dari kajian yang telah dilakukan.

### **6.1.3 Bagian Akhir**

Berisikan simpulan yang merupakan penegasan kembali dari interpretasi yang telah dihasilkan dalam bab-bab sebelumnya. Bagian ini berisikan juga penjelasan dari permasalahan yang telah dijawab dalam penelitian.

## **6.2 Bentuk Penulisan**

Historiografi sebagai suatu teknik penyampaian informasi mempunyai ragam, sifat, model, dan gaya penulisannya tersendiri. Bentuk penulisan suatu karya sejarah tidak akan sama dengan bentuk penulisan kajian lain karena karya sejarah

mempunyai sifat yang khas, yaitu berbicara tentang aktivitas manusia masa lalu dalam kebudayaannya.

### **6.2.1 Ragam Penulisan**

Secara umum ragam penulisan sejarah bersifat ilmiah dan dianjurkan dengan menggunakan ragam bahasa ilmiah yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, berbeda dengan ragam penulisan yang terdapat dalam surat kabar, majalah, atau media massa cetak lainnya yang bersifat populer atau ilmiah populer.

### **6.2.2 Sifat Penulisan**

Historiografi sangat erat dengan gaya penulisan yang disusun oleh seorang peneliti. Secara garis besar terdapat dua macam sifat narasi, yaitu (1) narasi ekspositoris dan (2) narasi sugestif. Narasi ekspositoris bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca agar mengetahui apa yang dikisahkan, serta menyampaikan informasi untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman pembaca terhadap masalah tertentu. Narasi sugestif bertujuan memberi makna atas suatu peristiwa atau kejadian. Narasi ini melibatkan daya khayal (imajinasi) karena mempunyai muatan untuk membeberkan amanat yang tersirat. Dalam hal historiografi sudah tentu yang dipilih adalah narasi ekspositoris yang khas, bukannya narasi sugestif, karena penulisan sejarah pada umumnya harus didasarkan pada data empirik yang lugas dan bersifat akademis. Dapat saja suatu narasi sugestif dijadikan dasar historiografi, mungkin dikarenakan tujuan tertentu seperti untuk menggugah semangat persatuan, kebangsaan, kebanggaan nasional, jatidiri bangsa, dan lain-lain.



### 6.3 Model Penulisan

Model penulisan sejarah dapat terbagi atas tematik, tematik terfokus, dan kronologis. Walaupun model penulisannya berbeda, tujuan tetap sama yaitu menyampaikan hasil kajian ilmu sejarah yang terikat dengan berbagai kaidahnya.

- a. Tematik: model penulisan ini berdasarkan pada tema-tema tertentu yang dikaji untuk kepentingan ilmu sejarah pada umumnya dan geografi sejarah khususnya. Dalam kajian geografi sejarah tema-tema yang dapat dijadikan dasar penulisan adalah perihal (1) lingkungan sejarah, (2) peradaban yang muncul dan berkembang di suatu wilayah, (3) penggabungan atau pemekaran wilayah, (4) dan juga tema pemetaan sejarah itu sendiri.
- b. Tematik terfokus adalah model penulisan tematik yang jauh lebih khusus lagi, misalnya tema “peradaban yang muncul dan berkembang di suatu wilayah” secara khusus dibahas menjadi “munculnya awal peradaban di tepi sungai-sungai”, atau tema khusus “gunung sebagai titik acuan perkembangan kebudayaan”.
- c. Kronologis adalah model yang sudah biasa digunakan dalam penulisan sejarah selama ini. Penekanannya adalah pada urutan waktu yang disesuaikan dengan pembagian bab atau subbab. Model kronologis sebenarnya dapat dilengkapi dengan tema atau subtema tertentu dalam penulisannya sehingga hasil penulisan menjadi lebih urut dan terfokus.

## **6.4 Gaya Penulisan**

Seperti yang biasa berlaku dalam historiografi, gaya penulisan pada umumnya terdiri dari gaya berkisah, pemerian, pembahasan, dan paparan. Uraian bentuk-bentuk gaya penulisan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Gaya berkisah atau narasi, uraiannya seperti halnya orang bercerita hanya saja dalam bentuk tulisan. Dalam penulisan geografi sejarah, seorang peneliti (sejarawan) harus mampu menyampaikan tulisannya yang menarik sehingga pembaca dapat memahami fenomena-fenomena dan permasalahan salah satu tema geografi sejarah yang sedang dibahas. Selain memuat kronologi, peristiwa, fenomena geografi yang berpengaruh dalam bahasan, juga harus mampu mengajak pembaca memahami apa yang diuraikannya tersebut.
- b. Gaya pemerian atau deskripsi, gaya penulisan seperti ini mengharapkan pembaca seakan-akan ikut menyaksikan apa yang pernah dilihat oleh penulis, mendengar seperti yang pernah didengar oleh si penulis, merasakan situasi yang mencekam, mengharukan, gegap gempita, bersemangat, khidmat, dan lain-lain. Dalam penulisan geografi sejarah, gaya pemerian ini kiranya sangat sesuai karena menguraikan berbagai gejala sejarah (kronologi, peristiwa, tokoh) dan juga bermacam bentuk fenomena geografis di lapangan.
- c. Gaya pembahasan atau argumentasi, penulisan dengan gaya seperti ini bermaksud untuk dapat membuktikan suatu pendapat, interpretasi baru, meyakinkan khalayak pembaca, serta mampu menjadikan pembaca setuju kepada pernyataan

yang diuraikan dalam tulisan tersebut. Misalnya pemisahan Gorontalo dari Provinsi Sulawesi Utara diungkap dengan gaya argumentasi sehingga pembaca dapat menerima terjadinya pemisahan wilayah tersebut. Contoh lain, yaitu legenda Putri Hijau yang mempunyai arti sebagai rasa patriotik dan percaya diri yang besar dari sang Putri. Tafsiran itu harus diungkap dalam penulisan sehingga pembaca terhanyut dan menyetujui uraiannya.

- d. Gaya paparan atau eksposisi, gaya penulisan ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan yang berujung pada pemahaman yang lebih baik pada diri pembaca. Terjadinya migrasi suku Laut yang selalu berpindah-pindah dari satu perairan ke perairan lain di wilayah Riau Kepulauan dapat diungkap dengan penulisan gaya paparan. Dengan pemaparan yang baik pembaca akan lebih banyak mengetahui informasi tentang suku Laut sehingga akan mencapai pemahaman yang lebih mendalam.

Pada dasarnya tidak ada gaya penulisan yang berdiri sendiri dalam suatu bentuk historiografi. Jadi tidak ada penulis yang terus-menerus mempertahankan gaya berkisah dalam seluruh isi tulisannya dari awal sampai akhir atau penulis tetap mempertahankan gaya argumentasi terus menerus sepanjang tulisan yang disusunnya. Gaya-gaya penulisan itu tentu saja dapat digabungkan satu dengan lainnya, tergantung pada keperluan bab-bab yang disusun. Misalnya, dalam bab pendahuluan, gaya tulisan yang dipilih tentunya gabungan antara gaya argumentasi dan gaya paparan. Dalam bab-bab isi, gaya penulisan yang diacunya dapat berupa gaya berkisah (narasi), gaya pemerian

(deskripsi), dan lainnya lagi. Dengan demikian bentuk historiografi yang ditampilkan merupakan karya penulisan dengan berbagai gaya namun dalam bentuk yang utuh sebagai kesatuan tulisan yang runtun dari awal hingga akhir.

## **6.5 Visualisasi Peta**

Visualisasi peta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penulisan historiografi atas kajian geografi sejarah. Peta-peta menjadi penting karena kajian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa sejarah dalam kronologi tertentu dan dalam ruang geografi tertentu pula. Melalui geografi sejarah diharapkan bahwa penelidikan sejarah masa lalu dengan tema-tema tertentu dapat dipahami lagi secara baik. Bentuk peta ada yang sederhana, tetapi ada pula yang lengkap dengan berbagai informasinya, akurat dan presisi perihal keletakan benda, permukiman, jalan, dan berbagai fenomena geografis lainnya.

## **6.6 Lain-lain**

### **6.6.1 Catatan Kaki**

Catatan kaki adalah keterangan tambahan atau bagian teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Sebagai keterangan tambahan, catatan kaki tidak terlepas dari isi teks utama yang akan diberi penjelasan. Pada dasarnya sebuah catatan kaki dibuat untuk maksud sebagai berikut.

- a. Pembuktian, yaitu menunjukkan tempat atau sumber tentang suatu kebenaran yang telah dibuktikan oleh orang lain.

- Menunjukkan sumber kutipan atau literatur yang digunakan dalam merujuk isi tulisan.
- b. Pernyataan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya
  - c. Penyampaian keterangan tambahan untuk memperkuat uraian di luar persoalan atau garis-garis yang diperbolehkan oleh laju teks. Keterangan tambahan dapat berbentuk inti atau sari suatu fragmen yang dipinjam.
  - d. Uraian teknis, keterangan insidental atau materi yang memperjelas teks atau informasi tambahan terhadap topik yang disebut dalam teks, materi-materi penjelas yang kurang penting, seperti perbaikan atau pandangan lain yang bertentangan, rujuk silang untuk memberi catatan atau memeriksa uraian pada halaman atau bab lain sebelumnya ataupun yang akan diuraikan kemudian, juga untuk mengacu lampiran, lazimnya digunakan kata-kata “lihat juga”; “bandingkan dengan”, “lihat lampiran...”

### **6.6.2 Catatan Belakang**

Teknik penulisan catatan belakang sama dengan teknik penulisan catatan kaki, tetapi diletakkan pada bagian belakang akhir teks tulisan.

### **6.6.3 Kutipan**

Ada dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sebuah kutipan langsung, mempunyai syarat lebih dari tiga baris. Dalam penulisannya, kutipan dipisahkan dari teks dalam jarak dua spasi. Jarak antara baris dengan baris kutipan satu spasi. Sesudah kutipan langsung diberi nomor penunjukan (*footnote*) dan seluruh kutipan dimulai dengan alenia baru tanpa

tanda kutip/tanda petik. Kutipan tidak boleh dikurangi atau diubah kalimatnya.

Jika kalimat yang dikutip tidak lebih dari tiga baris, kutipan tersebut tidak perlu dipisahkan, tetapi dimasukkan ke dalam kalimat pada alinea tertentu dengan menggunakan kata sambung, pada akhir kutipan diberi nomor penunjukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Muhammad Ridwan, *Orang Mandar Orang Laut: Kebudayaan Bahari Mandar Mengarungi Gelombang Perubahan Zaman*. Jakarta: KPG dan Yayasan Adikarya Ikapi, 2005.
- Asnan, Gusti, "Dari Sungai ke Jalan Raya: Perubahan Sosial-Ekonomi di Daerah Perbatasan Sumatra Barat-Riau pada Awal Abad XX", dalam Edi Sedyawati dan Susanto Zuhdi (ed.). *Arung Samudera: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, LPUI, 2001.
- Barnes, R. H., *Sea Hunters of Indonesia: Fishers and Weavers of Lamalera*. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Braudel, Fernand, *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Phillip II*, vol. I, edisi ke-4. New York: Fontana/Collins, Harper & Row, 1981.
- Burke, Peter, *The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-1989*, Stanford: Stanford University Press, 1990.
- Butlin, A. Robin, *Historical Geography : Through the Gates of Space and Time*. London: Arnold Publisher, 1993.
- Childe, Gordon, *The Urban Revolutions: Contemporary Archaeology*. Carbondale dan Edwardville: Southern Illionis University Press, 1972.

- Clarck, H. Andrew, "Historical Geography" dalam *American Geography : Inventory & Prospect*, James, E. Preston dkk. (ed.). Associations of American Geographers, Syracuse University, 1954.
- Daldjoeni, N. *Perkembangan Filsafat Geografi, Dari Herodotus sampai Hagget*. Bandung: Pustaka Alumni, 1996.
- Danandjaja, James, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta, Grafiti Pers, 2002.
- Fox, James J., *Panen Lontar: Perubahan Ekologi dalam Kehidupan Masyarakat Rote dan Sawu*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Geertz, Clifford, *Santri, Abangan, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Iskandar, Johan, *Ekologi Perladangan di Indonesia: Studi Kasus dari Daerah Baduy Banten Selatan, Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Kana, Niko L., *Dunia Orang Sawu*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Kausar, A.S., "Kebijakan Otonomi Daerah dalam Rangka Distribusi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dalam Koridor Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah", makalah dalam Seminar Nasional Pemekaran Wilayah Sulawesi dalam Perspektif Sejarah. Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Makassar, 25—28 April 2006.
- Keraf, Gorys, *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jilid I dan II. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.



- Lapian, A.B., "Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi pada Abad XIX", Disertasi pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987.
- Lapian, A.B., "Nusantara: Silang Bahari", dalam Henri Chambert-Loir & Hasan Muarif Ambary (Penyunting), *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard*. Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Liebner, Horst H., "Perahu-Perahu Tradisional Nusantara: Suatu Tinjauan Sejarah Perkapalan dan Pelayaran" dalam Edi sedyawati (ed.), *Eksplorasi Sumber Budaya Maritim*, Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan RI dan PPKB-DRPM Universitas Indonesia, 2005.
- Lombard, Dennis, *Nusa Jawa Silang Budaya*, Jilid I Batas-Batas Pembaratan, Jilid II Jaringan Asia, Jilid III Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Melalatoa, Junus, *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: Pamator, 1997.
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2006.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rahardjo, Supratikno, *Peradaban Jawa Abad ke-8 Sampai dengan Abad ke-15: Sebuah Kajian Tentang Dinamika Pranata-Pranata Politik, Agama dan Ekonomi, Jawa Kuno*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2002.
- Reid, Anthony, *Asia Tenggara Kurun Niaga: Negeri di Bawah Angin*. Jakarta: Obor, 1993.

- Sauer, O. Carl, *Foreword to Historical Geography*. University of California, 1941, Text converted by Burns Tiffany *et al*, 1997.
- Soekanto, Surjono, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Sumaatmadja, Nursid, *Studi Geografi, Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Pustaka Alumni.
- Van Leur, J. C. dan F. R. J. Verhoeven, *Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia*. Jakarta: Bhratara, 1974.
- Wahyono, Ary, dkk, *Hak Ulayat laut di Kawasan Timur Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.
- Wangania, J., *Jenis-Jenis Perahu di Pantai Utara Jawa Madura*. Jakarta: Ditjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980/1981.
- Yamin, Muhammad, *Atlas Sedjarah, Jaitu Risalah Berisi 83 Peta Melukiskan Perjalanan Sedjarah Indonesia dan Sedjarah Dunia Untuk Dipergunakan di Pelbagai Perguruan*. Djakarta: Djambatan, 1956.



**Direktorat Geografi Sejarah**  
Kompleks Depdiknas Ged. E Lt. 8  
Jl. Jend. Sudirman Senayan Jakarta